



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

2022

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

2022

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 versi revisi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 5 Sasaran Program (SP) dengan 8 Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 5 Direktorat Teknis, 7 Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, 44 Politeknik Negeri, dan 5 Akademi Komunitas Negeri, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2022.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2022, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan rencana aksi dan kebijakan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2022, dan semoga laporan kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2023
Direktur Jenderal,

Kiki Yuliati

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	vi
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Gambaran Umum	1
Dasar Hukum.....	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
Isu Strategis.....	6
Peran Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
Visi dan Misi.....	8
Tujuan Strategis.....	8
Rencana Kinerja Jangka Menengah.....	9
Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022	10
Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal.....	10
Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022.....	11
Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi	12
Program Prioritas	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
Pengukuran Kinerja.....	14
Capaian Kinerja	14
Realisasi Anggaran.....	68
Efisiensi Anggaran	69
<i>Cross Cutting</i> /Kolaborasi Program Ditjen Pendidikan Vokasi.....	70
Inovasi yang Dilakukan	71
Penghargaan yang Dicapai	74
BAB IV PENUTUP.....	81

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	5
Gambar 3.1	Grafik Tren Peningkatan Jumlah Mahasiswa Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2022.....	15
Gambar 3.2	Grafik Peningkatan Jumlah Mahasiswa PTV Tahun 2020 - 2022	17
Gambar 3.3	Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.	17
Gambar 3.4	Pembangunan Gedung Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember sumber dana SBSN	17
Gambar 3.6	Politeknik Negeri Nunukan.....	18
Gambar 3.7	Salah satu contoh pendirian prodi baru pada Politeknik Negeri Padang	19
Gambar 3.8	Proses Pembelajaran pada PSDKU.....	19
Gambar 3.9	Grafik Perbandingan capaian 2021, target 2022 dan capaian 2022 pada seluruh IKP di SP 2	22
Gambar 3.10	Grafik Trend Capaian IKP 2.1.....	25
Gambar 3.11	Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.	25
Gambar 3.12	Kegiatan SMK PK.....	26
Gambar 3.13	Grafik Trend Capaian IKP 2.2.....	32
Gambar 3.14	Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.	32
Gambar 3.15	Program Sertifikasi Kompetensi.....	32
Gambar 3.16	<i>Competitive Fund</i> : Pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Dokumen Transformasi D3 Menjadi D4 (Sarjana Terapan) Tahun 2022	33
Gambar 3.17	<i>Matching Fund</i>	33
Gambar 3.18	<i>Project Based Learning Expo</i>	33
Gambar 3.19	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi	34
Gambar 3.20	Grafik perbandingan angka absolut lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja dan berwirausaha dengan jumlah lulusan PKK dan PKW	37
Gambar 3.21	Grafik Trend Capaian IKP 2.3.....	39
Gambar 3.22	Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.	39
Gambar 3.23	PKK Program Keahlian Komputer.....	40
Gambar 3.24	PKK Program Keahlian Awak Kabin.....	40
Gambar 3.25	PKK Program Keahlian Las.....	41

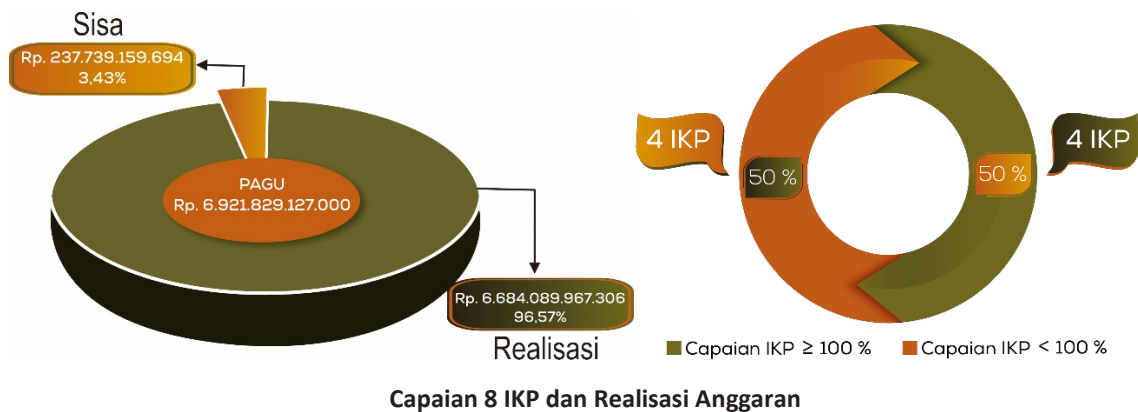
Gambar 3.26	PKW Program Keahlian Menjahit	41
Gambar 3.27	PKW Program Keahlian Tata Rias.....	41
Gambar 3.28	PKW Program Keahlian Tata Busana.....	42
Gambar 3.29	Grafik Trend Capaian IKP 2.4.....	46
Gambar 3.30	Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.	46
Gambar 3.31	Pelatihan Guru Bidang Budidaya Perikanan.....	47
Gambar 3.32	Pelatihan Guru Bidang Pengolahan Makanan Surimi.....	47
Gambar 3.33	Pelatihan Guru Bidang <i>Periodic Maintenance</i>	47
Gambar 3.34	Grafik Trend capaian baseline 2020, 2021, dan 2022.....	51
Gambar 3.35	Grafik perbandingan capaian 2022 dan target akhir renstra.....	53
Gambar 3.36	Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ..	53
Gambar 3.37	Sosialisasi intensif Kekayaan Intelektual.....	54
Gambar 3.38	Bimtek Penyusunan Dokumen Permohonan Paten.....	54
Gambar 3.39	Perbandingan capaian tahun 2021 dan 2022.....	57
Gambar 3.40	Grafik perbandingan nilai angka SAKIP Ditjen Vokasi tahun 2021 dan 2022.....	57
Gambar 3.41	Kegiatan Penyusunan LAKIN di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	59
Gambar 3.42	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022.....	60
Gambar 3.43	Kegiatan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022.....	60
Gambar 3.44	Grafik Perbandingan capaian IKP antara realisasi 2021, target 2022 dan capaian 2022	62
Tabel 3.10	Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM	63
Gambar 3.45	Grafik Trend Capaian IKP 5.1.....	65
Gambar 3.46	Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.	65
Gambar 3.47	Pendampingan penilaian ZI WBBM di BMTI	65
Gambar 3.48	Pendampingan penilaian ZI WBBM di BMTI	66
Gambar 3.49	Pendampingan penilaian ZI WBBM di BMTI	66
Gambar 3.50	Grafik Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022	68
Gambar 3.51	Aplikasi <i>Dashboard</i> Kinerja	72
Gambar 3.52	Aplikasi SIAP.....	72
Gambar 3.53	Aplikasi Meja Bantu.....	73
Gambar 3.54	Aplikasi <i>Tracer Study</i>	73
Gambar 3.55	Aplikasi Simpedik	74
Gambar 5.1	Grafik Realisasi Anggaran dan Capaian IKP.....	81

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.....	5
Tabel 2.1	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program.....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Awal	10
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal	10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Revisi.....	11
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi.....	12
Tabel 2.6	Program Prioritas.....	12
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja	14
Tabel 3.2	Matriks Indikator Kinerja 1.1	16
Tabel 3.3	Matriks Indikator Kinerja 2.1	24
Tabel 3.4	Matriks Indikator Kinerja 2.2	31
Tabel 3.5	Matriks Indikator Kinerja 2.3	38
Tabel 3.6	Matriks Indikator Kinerja 2.4	45
Tabel 3.7	Matriks Indikator Kinerja 3.1	52
Tabel 3.8	Matriks Indikator Kinerja 4.1	58
Tabel 3.9	Rincian nilai pada masing-masing komponen SAKIP	59
Tabel 3.11	Matriks Indikator Kinerja 5.1	64
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran	69

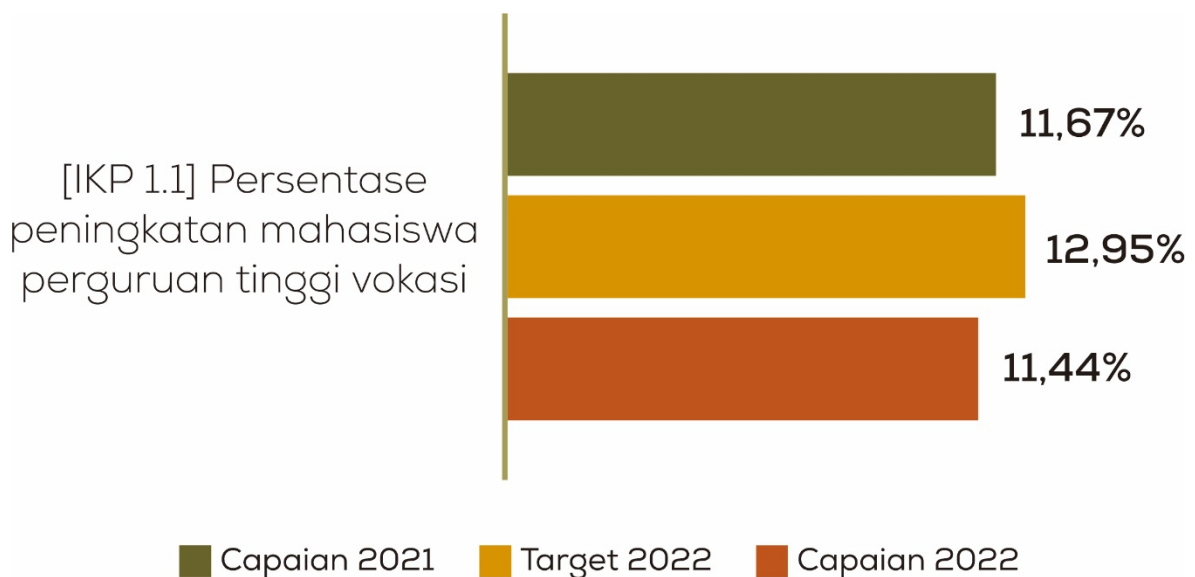
Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi menyajikan tingkat capaian 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagaimana ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022.



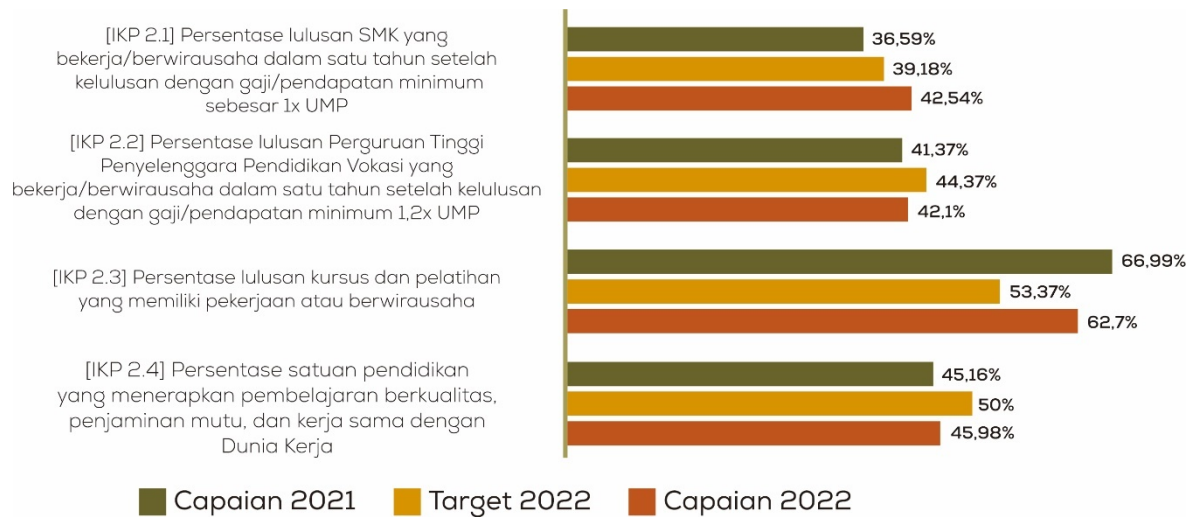
Sasaran Program 1

Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi.



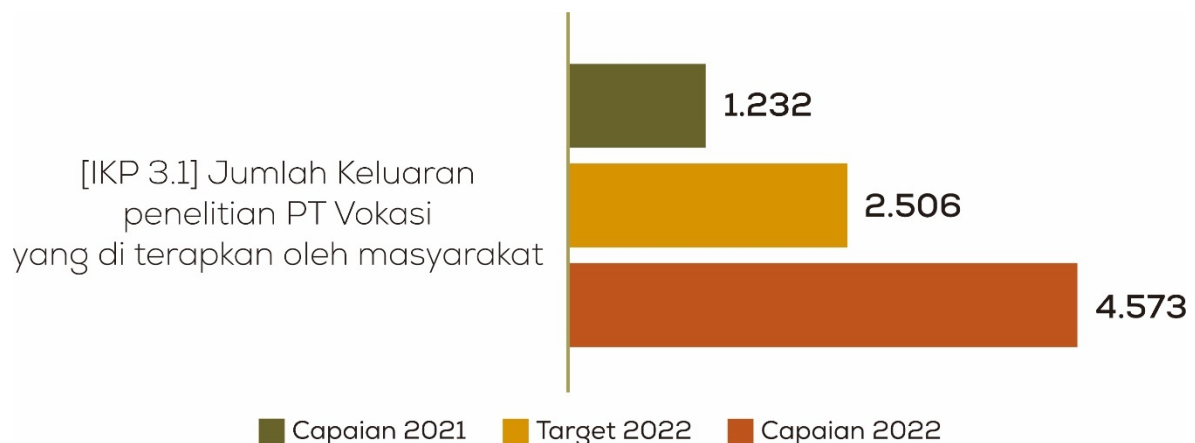
Sasaran Program 2

Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.



Sasaran Program 3

Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi.



Sasaran Program 4

Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

PREDIKAT PREDIKAT



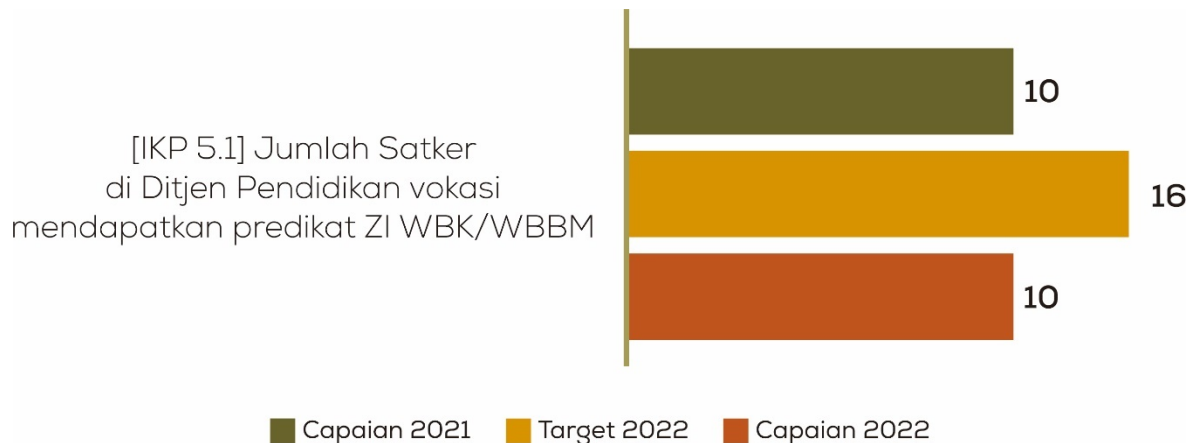
2021



2022

Sasaran Program 5

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek.



Kendala dan Permasalahan Umum



01

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di Ditjen Pendidikan Vokasi, serta belum optimalnya proses pembelajaran maupun pelatihan pada satuan pendidikan karena keterbatasan pertemuan tatap muka. Selain itu, pandemi Covid-19 tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan aktivitas di dunia usaha dan dunia kerja sehingga berdampak pada keterserapan lulusan di dunia usaha dan dunia kerja.

02

Penyebaran perguruan tinggi vokasi yang belum merata sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri turut serta mempengaruhi minat masyarakat pada bidang keahlian tertentu sehingga berdampak pada partisipasi pendidikan tinggi vokasi.

03

Lulusan pendidikan vokasi yang masuk ke dunia kerja kurang dari satu tahun setelah kelulusan belum memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan karena tidak sesuai dengan program keahlian, sehingga upah yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan UMP.

04

Belum optimalnya keterlibatan industri dalam proses pengembangan pembelajaran, tata kelola serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan vokasi sehingga proses *transfer knowledge* tidak berjalan sebagaimana mestinya.

05

Implementasi kurikulum merdeka masih perlu upaya/dorongan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah serta praktisi IKM guna mengoptimalkan pemanfaatan *platform* IT atau digital yang disiapkan dalam dalam menunjang IKM.

Langkah-langkah Antisipasi



01

Pemerintah telah mencabut masa pandemi sehingga satuan pendidikan bisa mengoptimalkan proses pembelajaran dan pelatihan secara tatap muka dengan cara mengidentifikasi kebutuhan untuk pembelajaran.

02

Identifikasi penyebaran perguruan tinggi vokasi sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan dunia usaha dunia industri untuk melakukan pemetaan program studi yang dibutuhkan pada masing-masing wilayah.

03

Memperkuat kerja sama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan *sharing* terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri, serta meningkatkan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

04

Melibatkan Industri dalam proses pengembangan pembelajaran, tata kelola serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan vokasi untuk membantu proses *transfer knowledge*.

05

Melaksanakan sosialisasi kurikulum dengan melibatkan BBPPMPV/BPPMPV, Dinas Pendidikan Provinsi dan Praktisi IKM.

BAB I PENDAHULUAN



Gambaran Umum





Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 yang telah direvisi dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Salah satu prioritas nasional pada pembangunan periode tahun 2020-2024 adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terwujud SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus melakukan inovasi dan berupaya agar dapat menghasilkan SDM Vokasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Dasar Hukum



Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkewajiban menyampaikan laporan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berlandaskan asas akuntabilitas dan dasar hukum sebagai berikut:

-  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
-  Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
-  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
-  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
-  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
-  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
-  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut,

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
3. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
4. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
5. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
6. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi.
7. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
8. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi.
9. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru dan dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi.

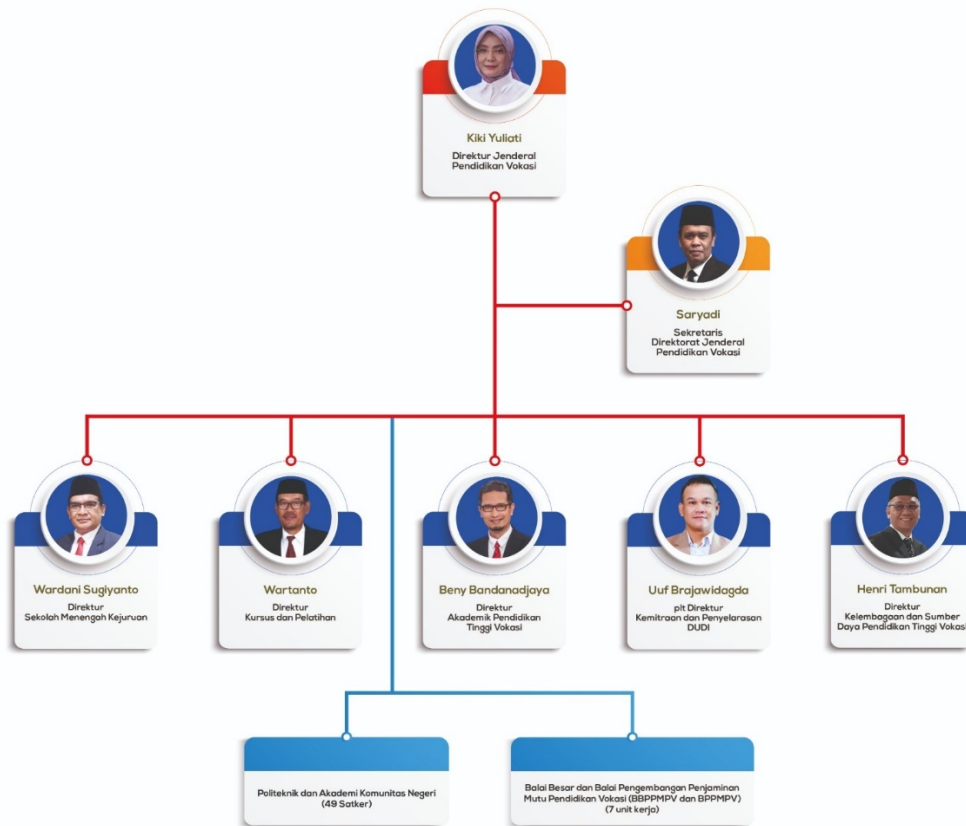
10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
11. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
12. pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.
13. perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing serta perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing.
14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
15. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai penjabaran Peraturan Presiden tersebut, dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi terdistribusikan dengan baik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sesuai Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tersebut, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

(Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek)



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebanyak 15.267 orang, yang terbagai atas:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	119
2	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	107
3	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	69
4	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	44
5	Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	58
6	Direktorat Kursus dan Pelatihan	70
7	BBPMPV/BPPMPV	1.145
8	Politeknik	13.545
9	Akademi Komunitas Negeri	110
Jumlah		15.267

Isu Strategis



- 1 Optimalisasi pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi vokasi.
- 2 Optimalisasi kompetensi lulusan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dalam rangka meningkatkan angka keterserapan lulusan, baik bekerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan studi dengan penghasilan yang layak.
- 3 Optimalisasi relevansi pembelajaran/kurikulum pada pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.
- 4 Optimalisasi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 5 Optimalisasi program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 6 Optimalisasi lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 7 Optimalisasi satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan dunia kerja.
- 8 Optimalisasi mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi.
- 9 Optimalisasi pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi vokasi.
- 10 Optimalisasi hasil riset dan pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi vokasi.
- 11 Optimalisasi tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
- 12 Optimalisasi program untuk revitalisasi SMK sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan kemendikbudristek dengan mengacu kepada Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan SMK, Kemendikbudristek telah mempunyai arah yang jelas untuk melakukan revitalisasi SMK.
- 13 Transformasi ekosistem pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan dunia kerja.



Peran Strategis

- 1 Berperan penting dalam mendorong keterlibatan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pendidikan vokasi.
- 2 Memastikan kurikulum dan pelatihan pada pendidikan vokasi berdampak pada pengembangan serta peningkatan *technical skills*, *soft skills*, budaya kerja dan karakter lulusannya.
- 3 Mendorong pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, riset terapan dan inovasi, serta untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran kewirausahaan pada pendidikan vokasi serta meningkatkan kemitraan satuan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- 4 Memfasilitasi praktik kerja lapangan dan/atau *project work* peserta didik pada pendidikan vokasi.
- 5 Mendukung pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan.
- 6 Memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama dunia kerja dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni.
- 7 Menggerakkan dukungan dunia kerja terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan asosiasi industri.
- 8 Mengoptimalkan pemanfaatan *platform digital* sebagai media informasi terkait dunia kerja bagi peserta didik.
- 9 Mengoptimalkan pemanfaatan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

- Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
- Berkebhinekaan global
- Bergotong royong
- Mandiri
- Bernalar kritis
- Kreatif

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Misi

Tujuan Strategis



- 1** Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
- 2** Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter.
- 3** Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi.
- 4** Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan penyusunan revisi renstra 2020-2024 yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Tujuan penyusunan revisi Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui revisi renstra 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan penyesuaian Rencana Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Program/Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Target			
			2022	2023	2024	
SP 1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi					
IKP 1.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98
SP 2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKP 2.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33,57	39,18	42,18	46,18
IKP 2.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	31,15	44,37	47,37	50,37
IKP 2.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	46,74	53,37	56,69	60
IKP 2.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	12,31	50	55	60
SP 3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi					
IKP 3.1	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.270	2.506	2.611	2.722
SP 4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi					
IKP 4.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A
SP 5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudris-					
IKP 5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	7	16	26	46

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	12,95
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	39,18
		2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	44,37
		3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	53,37
		4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	50
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.506
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	16

Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.426.269.797.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	615.789.602.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	37.061.455.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	100.818.410.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	328.891.918.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	1.631.627.537.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	82.542.237.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	168.078.391.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	96.772.910.000
TOTAL			5.487.852.257.000

Perjanjian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2022 disusun pada awal tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.487.852.257.000. Namun pada akhir tahun dilakukan revisi perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran menjadi Rp6.920.676.563.000. Pergeseran anggaran tersebut bersumber dari penambahan BA BUN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pengurangan anggaran karena dikeluarkannya blokir AA dari perhitungan pagu anggaran pada akhir tahun 2022. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada program SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan, pembinaan Kursus dan Pelatihan pada program PKK dan PKW, peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi pada program penelitian, pengabdian masyarakat, layanan pembelajaran, layanan pendidikan, sarana dan prasarana, termasuk pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi pada program *upskilling* dan *reskilling* untuk guru kejuruan, kepala sekolah, dosen dan instruktur kursus.

Terdapat perbedaan pagu anggaran pada perjanjian kinerja revisi tahun 2022 dengan pagu definitif pada akhir masa pelaporan 2022 karena beberapa politeknik dan AKN yang menerima hibah dari pemerintah daerah. Penambahan anggaran ini sebesar Rp1.152.564.000, baru masuk ke pagu Ditjen Pendidikan Vokasi pada bulan Januari 2023, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp6.921.829.127.000.

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Revisi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	12,95
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	39,18
		2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	44,37
		3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	53,37
		4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	50
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.506
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapat predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	16

Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.432.229.215.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.509.638.947.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri	23.641.955.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	266.800.521.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	321.901.288.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	1.923.507.280.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	201.305.556.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	151.237.441.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	90.414.360.000
TOTAL			6.920.676.563.000

Program Prioritas

Pada tahun 2022 terdapat 20 Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Ditjen Pendidikan Vokasi. Program Prioritas Nasional ini dilaksanakan di semua Direktorat, BBPPMPV/BPPMPV, serta Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri. Adapun target dan realisasi dari masing-masing program prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Program Prioritas

No	Nama Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	Lembaga	100	931	931,00
2	Dunia Usaha/Dunia Industri yang menerapkan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi	Kesepakatan	200	244	122,00
3	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselarasn dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	3.144	7.429	236,29
4	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	model	14	36	257,14
5	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	3.048	7.648	250,92
6	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Up-skilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	7.687	10.526	136,93
7	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	Lembaga	80	204	255,00
8	Dosen yang mendapatkan pelatihan kompetensi berbasis kerjasama industri	Orang	390	457	117,18
9	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	unit	20	22	109,08

No	Nama Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
10	Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	19	24	126,32
11	SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Orang	100	122	122,00
12	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	370	471	127,30
13	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pemetaan Demand dan Supply Side Dengan DUDI	layanan	1	1	100,00
14	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.370	1.402	102,34
15	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Orang	7.500	12.130	161,73
16	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	45.000	45.000	100,00
17	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	100	100	100,00
18	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	31	56	180,65
19	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	30.000	41.722	139,07
20	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	19.896	22.063	110,89

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah melakukan pengukuran kinerja dengan capaian sebagai berikut,

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Realisasi 2022	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	12,95	11,44	88,34
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	39,18	42,54	108,58
		2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	44,37	42,10	94,88
		2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	53,37	62,71	117,50
		2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	50	45,98	91,96
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.506	4.573	182,48
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	100
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	16	10	62,50

Capaian Kinerja

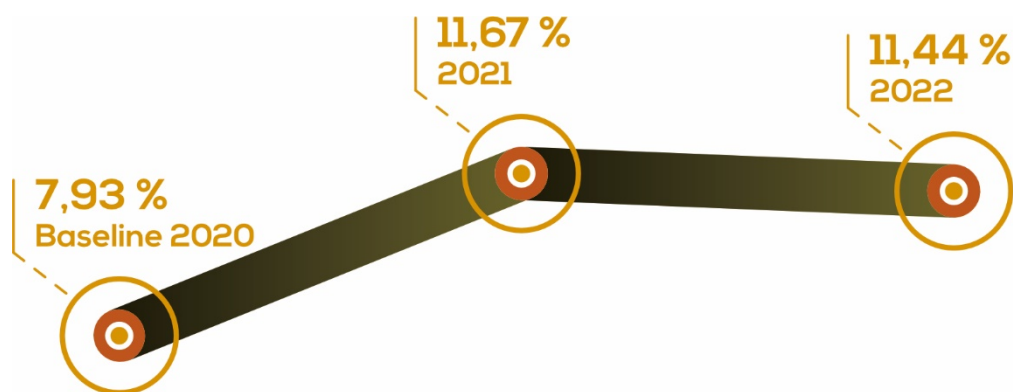
Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut ketercapaian SP dan IKP tersebut selama tahun 2022.

Sasaran Program 1. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi

Berdasarkan hasil Susenas 2022, Angka Partisipasi Kasar yang dihasilkan pada semua jenjang pendidikan tinggi untuk rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas (status ekonomi baik) menghasilkan nilai APK yang lebih tinggi dibandingkan dua kelompok di bawahnya. Hal ini memang wajar terjadi, mengingat kemampuan ekonomi

rumah tangga mampu menciptakan peluang bagi anggota rumah tangga untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan.

Pada tahun 2021, partisipasi mahasiswa pendidikan tinggi vokasi mengalami peningkatan sebesar 3,74% dibandingkan dengan baseline 2020. Namun pada tahun 2022, partisipasi mahasiswa mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Penurunan ini disebabkan sebagai efek pandemi covid 19 yang masih berdampak hingga 2022, dimana mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun 2022 merupakan lulusan sekolah menengah pada tahun 2021.



Gambar 3.1 Grafik Tren Peningkatan Jumlah Mahasiswa Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2022

IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Semakin banyak mahasiswa pendidikan tinggi vokasi memberikan dampak pada semakin meningkatnya kualitas kehidupan bangsa dan masyarakat dimasa yang akan datang seiring laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang mendominasi peta demografi Indonesia, disamping tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri.

Mahasiswa perguruan tinggi vokasi adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi D1 sampai dengan S3 Terapan baik yang berasal dari Politeknik, Akademi Komunitas dan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi (UNISTA).

Formula perhitungan untuk IKP 1.1 adalah menghitung jumlah total mahasiswa perguruan tinggi vokasi dibagi jumlah total mahasiswa perguruan tinggi kemudian dikalikan 100%. Satuan yang digunakan adalah % (persen) dengan metode perhitungan kumulatif.

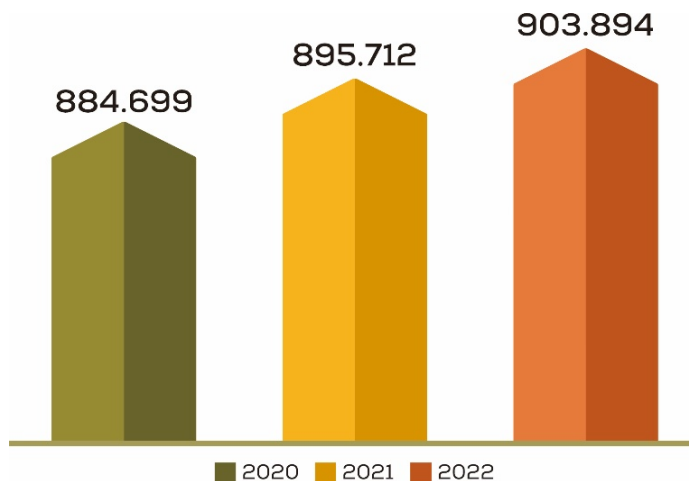
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{jumlah total mahasiswa pendidikan tinggi vokasi}}{\text{jumlah total mahasiswa pendidikan tinggi}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Matriks Indikator Kinerja 1.1

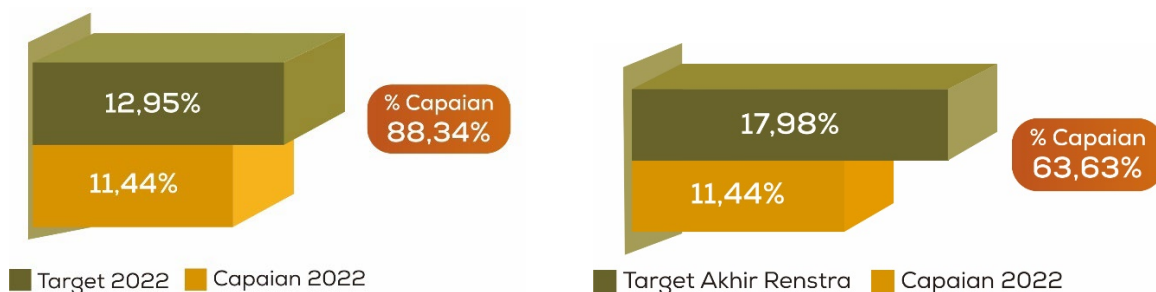
Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Target 2022			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	11,67	12,95	11,44	88,34	17,98	63,63

Capaian IKP 1.1 pada tahun 2022 diperoleh dari perhitungan jumlah total mahasiswa perguruan tinggi vokasi, yaitu sebanyak 903.894 orang dibagi dengan jumlah total mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 7.902.590 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 11,44%. IKP ini merupakan IKP baru pada tahun 2022 sesuai dengan Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 11,67%, capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,23%. Capaian ini pun belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 12,95%, atau baru mencapai 88,34%. Ketidaktercapaian target ini salah satunya disebabkan sebagai efek dari pandemi covid-19, karena jumlah mahasiswa yang diukur pada tahun 2022 merupakan mahasiswa yang mendaftar ke perguruan tinggi vokasi pada tahun 2021. Tahun 2021 dampak pandemi covid terhadap perekonomian masyarakat masih sangat tinggi, sehingga menurunkan partisipasi pendidikan termasuk pada pendidikan tinggi vokasi.

Adapun target akhir renstra tahun 2024 sebesar 17,98%, sehingga diperlukan peningkatan atas mahasiswa sebesar 6,31% selama dua tahun kedepan (2023 - 2024). Hal ini tentunya memerlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang tidak tercapai pada tahun 2022, maupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.



Gambar 3.2 Grafik Peningkatan Jumlah Mahasiswa PTV Tahun 2020 - 2022



Gambar 3.3 Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.4 Pembangunan Gedung Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember sumber dana SBSN



Gambar 3.5 Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta



Gambar 3.6 Politeknik Negeri Nunukan



Gambar 3.7 Salah satu contoh pendirian prodi baru pada Politeknik Negeri Padang



Gambar 3.8 Proses Pembelajaran pada PSDKU

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diberikan kepada Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri merupakan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dan diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat pembatasan sumbangan pendidikan pada perguruan tinggi. Sesuai Permenristekdikti No 12 Tahun 2019 tentang BOPTN pasal 2 dimana penggunaan anggaran BOPTN untuk penelitian dan PKM minimal

sebesar 30% dari anggaran BOPTN dan untuk non penelitian maksimal 70% dari anggaran BOPTN.

2. Program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah diberikan kepada 9 Politeknik dan 1 AKN di tahun 2022 serta 4 Politeknik yang merupakan luncuran di tahun 2021.
3. Pendirian program studi baru di tahun 2022 sebanyak 145 program studi di 33 Politeknik dan AKN. Contohnya pendirian program studi D3 Pemeliharaan Mesin di Politeknik Negeri Media Kreatif, D4 Usaha Perjalanan Wisata dan S2 Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Jembatan di Politeknik Negeri Padang.
4. Pendirian Politeknik Negeri Nunukan dengan 4 program studi dan 388 mahasiswa.
5. AKN Seni dan Budaya Yogyakarta dengan 3 program studi dan 80 mahasiswa.
6. Prodi Diluar Domisili (PDD) atau Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) pada beberapa politeknik negeri, seperti Politeknik Negeri Malang yang memiliki 30 PSDKU yang terdapat di Lumajang, Jepara, Sumbawa Barat dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya blokir anggaran pada BOPTN yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program.
2. Pada pelaksanaan SBSN, perencanaan dan pengajuan untuk proses tender membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga memperlambat proses lelang.
3. Pada pelaksanaan PSDKU sarana dan prasarana yang kurang memadai termasuk kelengkapan gedung belajar.
4. Terbatasnya hibah operasional PSDKU karena anggaran rupiah murni dari PDD tidak lagi dialokasikan.
5. Pada pendirian program studi baru terkendala dengan ketersediaan dosen sesuai dengan kebutuhan, serta proses akreditasi harus disusulkan kembali untuk *upgrading* D3-D4.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mengupayakan untuk proses buka blokir. Untuk kegiatan yang anggarannya tidak bisa dibuka blokir maka dihitung kembali sehingga target fisik tetap tercapai.

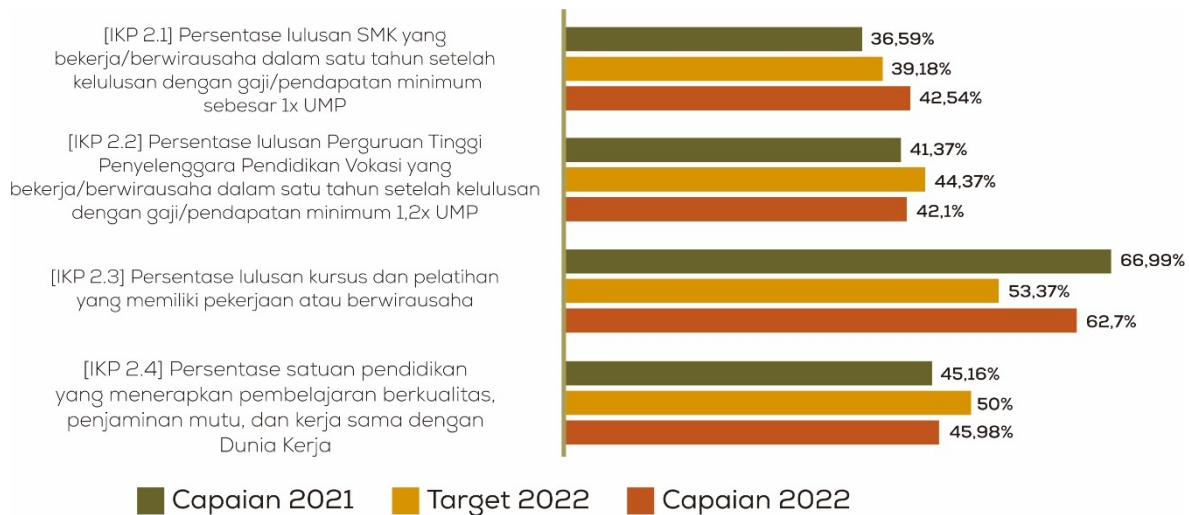
2. Mengupayakan pergeseran anggaran yang masih di blokir ke BA BUN.
3. Mempercepat perencanaan dan pengajuan proses tender agar proses lelang tepat waktu.
4. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana.
5. Mengupayakan penambahan biaya operasional khusus untuk PSDKU.
6. Menyiapkan dokumen dan persyaratan akreditasi sesuai dengan ketentuan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, dengan penyediaan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri vokasi, peningkatan pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, dan meningkatkan jumlah mahasiswa DI-DIV/Sarjana Terapan di PTN Vokasi kelompok UKT I dan II.
2. Mengoptimalkan percepatan pemenuhan tender untuk perguruan tinggi vokasi penerima SBSN tahun 2022.
3. Mengidentifikasi ketersediaan dosen sesuai dengan prodi baru.
4. Mengusulkan dan memetakan anggaran khusus PSDKU terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Sasaran Program 2. Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Sampai dengan tahun 2022, peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan kerja rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,



Gambar 3.9 Grafik Perbandingan capaian 2021, target 2022 dan capaian 2022 pada seluruh IKP di SP 2

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya: 1) Pelaksanaan SMK pusat keunggulan melalui skema pemadanan dukungan dari mitra dunia kerja, dimana telah dilaksanakan sosialisasi program, penerimaan pendaftaran dunia kerja, serta verifikasi dan kurasi terhadap jenis kegiatan dukungan yang akan dilaksanakan mitra industri di SMK. Bersama dengan mitra industri, pihak SMK Pusat Keunggulan diarahkan untuk melakukan sertifikasi kompetensi; 2) Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Kreatifitas Mahasiswa, dan *Matchingfund*; 3) Pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM PTV yang dilaksanakan dengan proses pemberian sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi secara sistematis dan objektif, mengacu pada standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional, internasional, atau standar yang berlaku; 4) Program Penyiapan dan Penguatan Program Studi pada Pendidikan Tinggi Vokasi (*Competitive Fund*) serta Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta (P3TV-PTS); 5) Program Kecakapan Kerja (PKK); 6) Program Kecakapan Wirausaha (PKW); dan 7) *Upskilling* dan *reskilling* untuk guru kejuruan dan kepala sekolah.

IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/ pendapatan minimum sebesar 1xUMP

Capaian IKP 2.1 pada tahun 2022 diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat data yang digunakan

untuk mengukur ketercapaian IKP ini merupakan data survei, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel dari populasi pada blok sensus, maka data yang ditampilkan adalah data relatif, bukan angka absolut.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan SMK.

Adapun kriteria bekerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah :

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian.
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.
6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.
8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang

diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Propinsi) atau upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Formula perhitungan untuk IKP 2.1 adalah dengan menghitung jumlah lulusan SMK yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP dibagi dengan jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan kemudian dikalikan 100%. Satuan yang digunakan adalah % (persen) dengan metode perhitungan nonkumulatif.

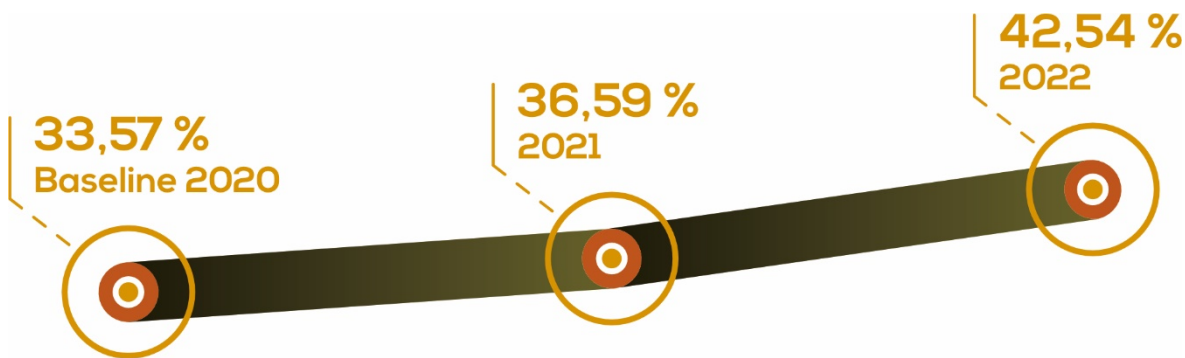
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah lulusan SMK yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP}}{\text{Jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Matriks Indikator Kinerja 2.1

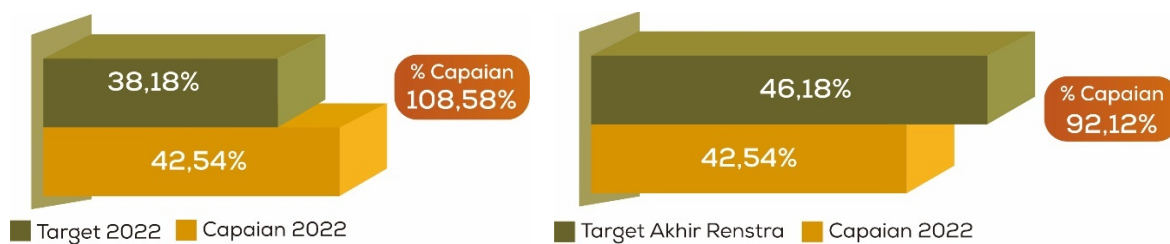
Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Target 2022			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1xUMP	36,59	39,18	42,54	108,5	46,18	92,12

Berdasarkan data sakernas bulan Agustus, capaian IKP ini adalah sebesar 42,54%. IKP ini merupakan IKP baru pada tahun 2022 sesuai dengan Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 36,59%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5,95%. Capaian ini juga sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 39,18%, atau mencapai 108,58%.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 46,18%, IKP ini baru tercapai 92,12%. Tentunya diperlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan yang belum tercapai pada tahun 2022, maupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.



Gambar 3.10 Grafik Trend Capaian IKP 2.1



Gambar 3.11 Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.

Dokumentasi Kegiatan

NAMA SMK : SMKS SINAR PARAHYANGAN
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT
SEKTOR : EKONOMI KREATIF

**RAPOR MUTU :
SANGAT BAIK**

KEGIATAN



SMK SINAR PARAHYANGAN
CENTER OF EXCELLENCE
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
KABUPATEN CIANJUR



LINK AND MATCH

PKL SISWA

SELEKSI REKUITMEN

GURU TAMU

SMK MEMBANGUN DESA

SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA

SEKOLAH PENCETAK WIRAUSAHA

PENYELARASAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR BERBASIS INDUSTRI

MOU PENYELARASAN KURIKULUM, GURU TAMU, MAGANG, RECRUITMENT

NAMA SMK : SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH
SEKTOR : SEKTOR LAINNYA

**RAPOR MUTU :
SANGAT BAIK**



NAMA SMK : SMK NEGERI 1 KLEGO
KABUPATEN : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH
SEKTOR : KONSTRUKSI DAN PEMESINAN

**RAPOR MUTU :
SANGAT BAIK**



Gambar 3.12 Kegiatan SMK PK

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Pelaksanaan program sertifikasi kepada 45.000 peserta didik SMK merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai dukungan dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi DUDI. Adanya pengakuan berstandar ini diharapkan mampu memberikan jaminan ketika lulusan SMK masuk ke dunia usaha dan

- dunia industri sehingga gaji/pendapatan dapat disesuaikan dengan UMP yang berlaku.
2. Pengembangan 1.401 SMK untuk menjadi pelaksana program Pusat Keunggulan, dengan 376 sekolah adalah SMK PK melalui Skema Pemadanan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan SDM sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga lulusannya diharapkan langsung direkrut oleh mitra DUDI.
 3. Upaya percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk 1.401 SMK PK, dengan memperbanyak pola pembelajaran magang di dunia kerja, guru/instruktur tamu dari DUDI, kelas industri serta penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui *teaching factory* di sekolah. Tahapan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan dengan melibatkan BBPPMPV/BPPMPV dan Perguruan Tinggi.
 4. Disamping itu, terdapat 6.804 SMK non PK yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui jalur mandiri, sesuai dengan SK BSKAP nomor: 044/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023. Tahapan yang telah dilaksanakan Direktorat SMK dan BBPPMPV/BPPMPV adalah sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui webinar.
 5. Pemetaan dan pengembangan melalui kajian dengan melibatkan *expert* serta DUDI untuk menentukan dan mengevaluasi kompetensi keahlian yang dianggap potensial untuk dilakukan pengembangan serta prioritas untuk diberikan intervensi.
 6. Program SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0 kepada 56 SMK, diberikan dalam rangka pengembangan kompetensi keahlian SMK berbasis digitalisasi pada proses penguatan pembelajaran dan/atau pemenuhan peralatan praktek dan/atau pengembangan ruang praktek siswa berbasis industri 4.0.
 7. Program SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan ke sebanyak 101 SMK, dalam upaya untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga pencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan menjadi wirausahawan muda.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program.
2. Belum semua SMK mempunyai LSP P1 (Lembaga Sertifikasi Profesi P1), sehingga pelaksanaan sertifikasi berpotensi tidak bisa diikuti seluruh siswa SMK, sementara untuk mengikuti sertifikasi di LSP P2/P3 biayanya tidak terjangkau.
3. SMK berpotensi mendapat program Pusat Keunggulan ternyata sudah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga tidak bisa mendaftar sebagai SMK PK.
4. Sosialisasi kurikulum yang dilaksanakan berbasis IT atau digital belum terbiasa diterima oleh satuan pendidikan, sehingga implementasinya belum optimal.
5. Implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan SMK belum terlaksana sepenuhnya, sehingga perlu dorongan dan pembinaan dari pemerintah daerah agar implementasinya lebih optimal.
6. Hasil pemetaan di masing-masing wilayah berbeda-beda, karena kebutuhan tenaga kerja setingkat SMK berbeda-beda sehingga konsentrasi keahlian di daerah tertentu masih diperlukan sementara di daerah lain seperti di Pulau Jawa sudah jenuh.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mengupayakan untuk proses buka blokir. Untuk kegiatan yang anggarannya tidak bisa dibuka blokir maka dihitung kembali sehingga target fisik tetap tercapai.
2. Mendorong pemerintah daerah provinsi untuk memfasilitasi pendirian LSP P1 pada SMK binaanya.
3. Melakukan sosialisasi kepada pemda provinsi agar SMK yang diunggulkan menjadi SMK PK tidak diprioritaskan untuk diberi alokasi anggaran DAK.
4. Melaksanakan sosialisasi kurikulum secara *blended* (daring dan luring) untuk selanjutnya dipantau hasilnya pada *platform* merdeka mengajar.
5. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah bahwa implementasi kurikulum merdeka tidak wajib, namun diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang benar-benar sudah siap melaksanakan IKM secara mandiri.

6. Penetapan konsentrasi keahlian potensial berdasarkan rekomendasi dari konsorsium vokasi (terdiri dari asosiasi industri yang bergabung dalam konsorsium).

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memastikan keterlibatan dunia kerja dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar berstandar dunia kerja, termasuk dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru, instruktur, dosen, kepala sekolah, pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan *assessment* terhadap hasil pembelajaran peserta didik.
2. Memfasilitasi *exchange of information* dari dunia usaha dan dunia industri dengan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui *platform* yang dapat digunakan seluruh peserta didik.
3. Mengembangkan kurikulum pada SMK yang disesuaikan dengan: (a) permintaan pasar dan kebutuhan dunia kerja (*demand and driven*); (b) ketersambungan (*link*) antara penggunaan lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta: (c) kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja.
4. Meningkatkan keterhubungan atau kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang pendidikan SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi.
5. Mendorong SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru, instruktur, dan sarana prasarana praktek (bengkel, laboratorium) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama.
6. Melakukan penguatan kerjasama *link and match* dengan DUDI terkait pembelajaran berbasis *project* dan penjaminan kompetensi melalui sertifikasi siswa SMK.
7. Fasilitasi kemandirian tata kelola kelembagaan dengan pengembangan produk/ jasa yang berkualitas yang bisa dipasarkan ke masyarakat melalui implementasi *teaching factory*.
8. Koordinasi dan membangun sinergitas serta sinkronisasi terkait program pembangunan dan pengembangan SMK Pusat Keunggulan dengan pemerintah daerah serta DUDI.
9. Pelaksanaan penjaminan mutu di SMK serta mendorong penerapan perencanaan berbasis data di tingkat satuan pendidikan.

IKP 2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP

Capaian IKP 2.1 pada tahun 2022 diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat data yang digunakan untuk mengukur ketercapaian IKP ini merupakan data survei, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel dari populasi pada blok sensus, maka data yang ditampilkan adalah data relatif, bukan angka absolut.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Program Diploma I, II, III, dan IV/Sarjana Terapan).

Adapun kriteria bekerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah :

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian.
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.

6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.
8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Propinsi) atau upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Formula perhitungan untuk IKP 2.2 adalah dengan menghitung jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2x UMP dibagi dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam 1 tahun setelah kelulusan dikalikan 100%.

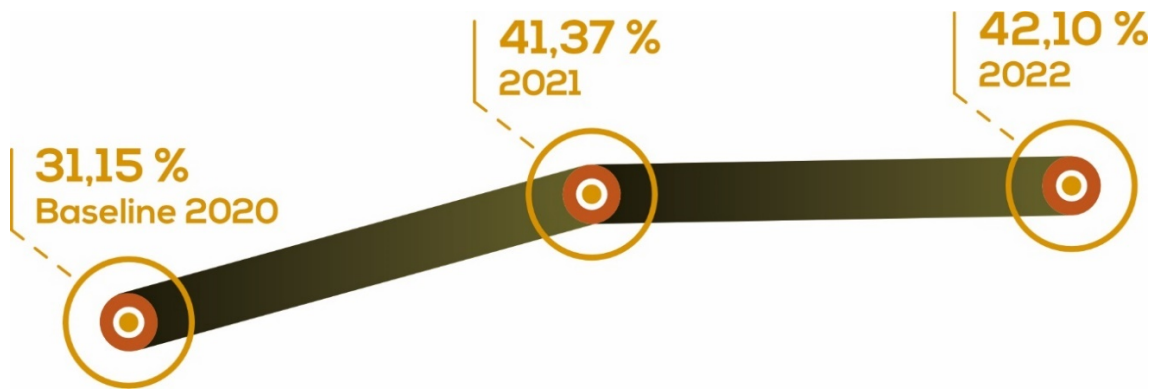
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2x UMP}}{\text{Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam 1 tahun setelah kelulusan}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 Matriks Indikator Kinerja 2.2

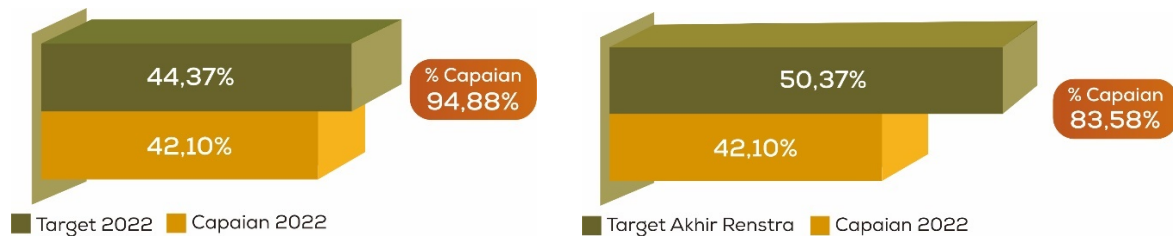
Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Target 2022			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	41,37	44,37	42,10	94,88	50,37	83,58

Berdasarkan data sakernas bulan Agustus, capaian IKP ini adalah sebesar 42,10%. IKP ini merupakan indikator baru pada tahun 2022 sesuai dengan Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 41,37%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,73%. Namun, capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 44,37%, atau baru mencapai 94,88%.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 50,37%, capaian ini baru mencapai 83,58%. Tentunya diperlukan inovasi dan strategi untuk menuntaskan kekurangan sebesar 6% yang tidak tercapai pada tahun 2022, maupun untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.



Gambar 3.13 Grafik Trend Capaian IKP 2.2.



Gambar 3.14 Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.15 Program Sertifikasi Kompetensi



Gambar 3.16 Competitive Fund: Pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Dokumen Transformasi D3 Menjadi D4 (Sarjana Terapan) Tahun 2022



Gambar 3.17 Matching Fund



Gambar 3.18 Project Based Learning Expo



Gambar 3.19 Kegiatan Sertifikasi Kompetensi

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (*Competitive Fund*), dengan total 151 program studi telah menerima bantuan program dan seluruh dana bantuan yang diterima ditujukan untuk proses penguatan mutu berstandar industri.
2. Program P3TV-PTS tahun 2022 telah ditetapkan 54 Perguruan Tinggi Swasta yang lolos verifikasi administrasi dan evaluasi kelayakan sebagai penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa peralatan yang relevan dengan pembelajaran pada prodi yang akan ditingkatkan mutunya dan bukan untuk mendukung penelitian dosen.
3. Program Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi diberikan kepada 122 dosen Perguruan Tinggi Vokasi sesuai dengan bidang yang dimiliki melalui sertifikasi kompetensi.
4. Program Kampus Merdeka Vokasi untuk penguatan tata kelola PTV melalui program *matching fund* yang telah disalurkan ke 167 Perguruan Tinggi Vokasi dengan melibatkan 503 mitra. Program *matching fund* dilaksanakan dengan 4 skema, yaitu Skema Hilirisasi Produk/Teknologi, Skema Penguatan Pusat Unggulan Teknologi, Skema Tefa/TI/CoE/, dan Skema Star-up Vokasi.
5. Program Sertifikasi Kompetensi (Sertikom), disalurkan bantuan kepada 8.480 mahasiswa dalam bentuk uji kompetensi mahasiswa vokasi untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), disalurkan bantuan kepada 1.110 mahasiswa, yang merupakan program yang

dilakukan oleh mahasiswa melalui UKM, HIMA Prodi, dan BEM, dengan tujuan menumbuhkan kepedulian dan mengundang kontribusi mahasiswa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), sudah disalurkan bantuan kepada 1.247 mahasiswa sebagai upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program.
2. Dari 5 program kemahasiswaan yang terdapat di RKAKL Dit. APTV hanya 3 program yang dapat dilaksanakan yaitu program sertikom, program PKM, dan program P2MD, sedangkan 2 program lainnya yaitu PWMV dan fasilitasi magang tidak bisa dilaksanakan karena sudah ada program *flagship* (MBKM).
3. Terbitnya aturan terkait TKDN pada pertengahan tahun 2022 turut memperlambat proses pengadaan barang, termasuk pada program *matching Fund*.
4. Pendistribusian bantuan idealnya melalui realokasi ke Pagu DIPA penerima, namun waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut cukup lama sehingga dipilih mekanisme kontrak ke perguruan tinggi penerima, dan pengadaan untuk PT satker dan BLU, melalui mekanisme bantuan pengadaan.
5. Keterlambatan penyampaian laporan dari PTV penerima CF, Dit.KLSD memberikan kebijakan perpanjangan waktu untuk penyampaian pelaporan, sehingga proses pencairan termin 2 terhambat.
6. Pada program P3TV-PTS terdapat keterlambatan pengiriman barang dari penyedia ke PTV, karena terbatasnya ketersediaan barang dalam kategori Produk Dalam Negeri (PDN).
7. Sistem aplikasi untuk mekanisme pelaporan baru dikembangkan pada awal tahun 2022 sehingga masih ada beberapa fitur yang perlu disempurnakan.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Menghitung ulang *unit cost* yang dibutuhkan untuk tahun 2023, sehingga *output* yang dihasilkan sesuai perencanaan.

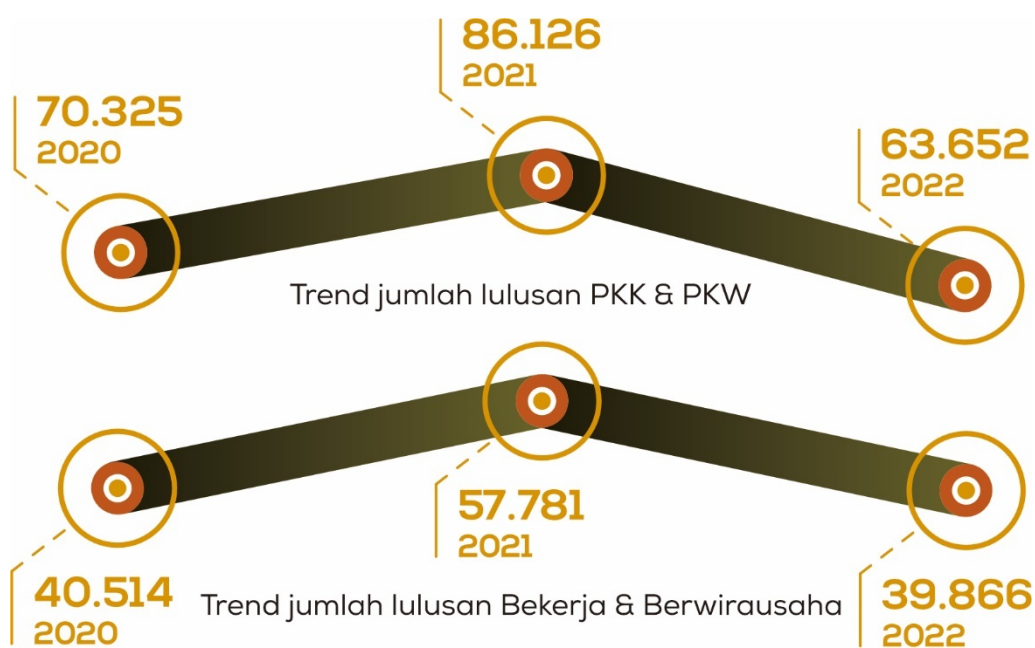
2. Mendorong satker untuk mengidentifikasi alat/bahan yang diperlukan untuk pengadaan, dan memprioritaskan TKDN atau PDN. Jika akan melakukan produk impor, maka proses pengajuan izin penggunaan barang impor ke eselon 1 dipercepat.
3. Melakukan proses seleksi lebih awal dan melakukan komunikasi dengan pihak DJA terkait kemungkinan proses pendistribusian bantuan MF melalui skema realokasi sehingga penerima memiliki cukup waktu untuk melaksanakan penelitian dan pengadaan.
4. Mendorong PTV untuk mempercepat proses pelaporan termin I, sehingga termin II dapat segera dicairkan.
5. Melakukan penyesuaian RAB sesuai dengan ketersediaan produk dalam negeri (PDN).
6. Pengembangan aplikasi untuk pelaporan kemajuan dari progres yang telah dilaksanakan akan disempurnakan kembali, sehingga di tahun 2023 pemanfaatannya dapat dioptimalkan.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Meningkatkan penerapan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja, mutu dan relevansi lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Pembinaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi.
3. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya Pendidikan Tinggi Vokasi serta meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Mendukung dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan keunggulan spesifik melalui tata kelola dan kemitraan serta inovasi pembelajaran.
5. Memperbaiki instrumen penilaian proposal dan instrumen monev untuk kegiatan kemahasiswaan.
6. Penerima bantuan program sertikom akan diprioritaskan bagi Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi (PTPPV).
7. Pelaksanaan workshop penyusunan proposal yang lebih efektif agar mudah dipahami untuk calon mahasiswa penerima pendanaan PKM agar sesuai dengan prosedur dan tujuan dari PKM.
8. Pemutakhiran program P2MD untuk mengoptimalkan program kerja organisasi mahasiswa Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan

Vokasi (PTPPV) agar menghasilkan teknologi tepat guna bagi desanya, serta akan dilakukan pemberian apresiasi kepada organisasi mahasiswa dan desa dengan nilai terbaik sebagai *role model*.

IKP 2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha



Gambar 3.20 Grafik perbandingan angka absolut lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja dan berwirausaha dengan jumlah lulusan PKK dan PKW

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan vokasi yang mendukung capaian ini diantaranya Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

PKK merupakan layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja. PKW merupakan suatu layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang menjadikan bekal untuk

berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha.

Lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha adalah lulusan PKK atau PKW yang bekerja atau berwirausaha 1 tahun setelah kelulusan dari satuan kursus dan pelatihan yang ber-NPSN yang diselenggarakan minimal 100 jam pelajaran. Kursus dan pelatihan dimaksud adalah jenis keterampilan vokasi yang berbasis dunia kerja.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Formulasi perhitungan untuk IKP 2.3 adalah dengan menghitung jumlah lulusan PKK atau PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha dibagi dengan jumlah lulusan PKK dan PKW kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah lulusan PKK atau PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PKK dan PKW}} \times 100\%$$

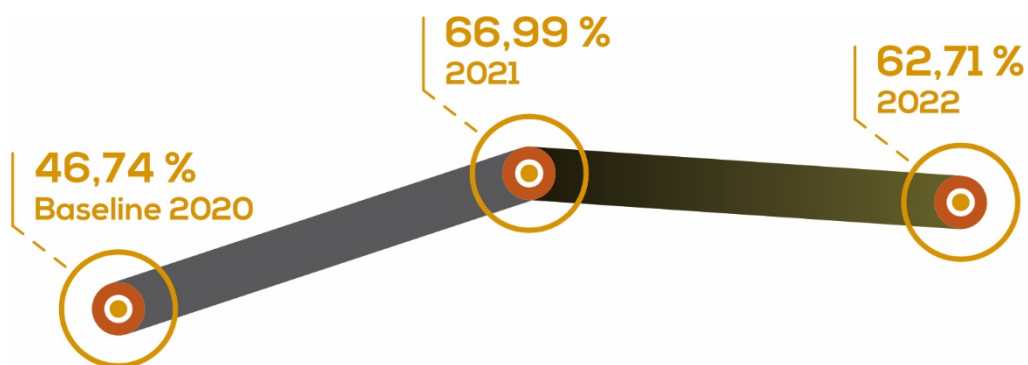
Tabel 3.5 Matriks Indikator Kinerja 2.3

Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Target 2022			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	66,99	53,37	62,71	117,50	60,00	104,52

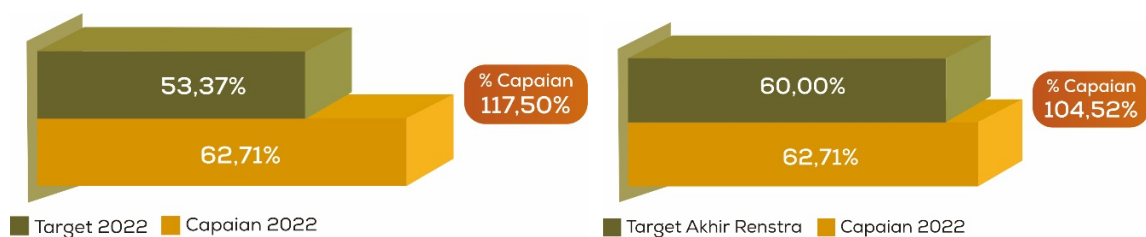
Capaian IKP 2.3 pada tahun 2022 diperoleh dari perhitungan jumlah lulusan PKK dan PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha yaitu sebanyak 39.916 orang dibagi dengan jumlah lulusan PKK dan PKW sebanyak 63.652 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 62,71%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 66,99%, capaian ini mengalami penurunan sebesar 4,28%. Penurunan capaian ini disebabkan penurunan jumlah sasaran lembaga penerima PKK dan PKW karena adanya

penyesuaian anggaran, dimana pada tahun 2021 jumlah lembaga penerima sebanyak 86.126 lembaga, sehingga terjadi penurunan sebanyak 22.474 lembaga pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 55,37%, atau mencapai 117,50%. Capaian melebihi target didukung oleh adanya pelaksanaan magang untuk peserta didik PKK yang telah melaksanakan uji kompetensi, dan adanya pemberian modal dan pendampingan merintis usaha dari mitra untuk peserta didik PKW yang telah selesai melaksanakan pembelajaran.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini juga sudah melampaui target sebesar 2,71% atau sudah mencapai 104,52%. Capaian ini tentunya harus dipertahankan, karena IKP ini dihitung secara tahunan dan bukan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dengan kata lain capaian pada tahun berikutnya bisa saja lebih rendah dibandingkan capaian tahun ini.



Gambar 3.21 Grafik Trend Capaian IKP 2.3.



Gambar 3.22 Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.23 PKK Program Keahlian Komputer



Gambar 3.24 PKK Program Keahlian Awak Kabin



Gambar 3.25 PKK Program Keahlian Las



Gambar 3.26 PKW Program Keahlian Menjahit



Gambar 3.27 PKW Program Keahlian Tata Rias



Gambar 3.28 PKW Program Keahlian Tata Busana

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Kecakapan Kerja (PKK), dengan total peserta didik yang telah menerima bantuan PKK sebanyak 41.589 orang peserta didik, dan dari jumlah tersebut peserta didik yang telah bekerja sebanyak 20.696 orang.
2. Program Kecakapan Wirausaha (PKW), dengan total peserta didik yang telah menerima bantuan PKW sebanyak 22.063 orang peserta didik, dari jumlah tersebut peserta didik yang telah merintis usaha sebanyak 19.220 orang.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pada program PKW terkendala dengan kurangnya pemahaman mitra terkait dengan tugasnya dalam melaksanakan pendampingan rintisan usaha.
2. Dalam kerjasama dengan Dekranas terdapat dua provinsi yang kabupaten/kotanya menggundurkan diri untuk melaksanakan program PKW.
3. Terdapat lulusan PKK yang sudah menyelesaikan pembelajaran hingga ujian kompetensi namun belum terserap di dunia kerja secara optimal karena terbatasnya lowongan pekerjaan bagi para pekerja pemula (*entry level*) yang menjadi sasaran program PKK sebagai dampak pandemi covid 19.

4. Banyak lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tepat waktu.
5. Bimbingan teknis penyelenggaraan program PKK dan PKW dilakukan secara blended (luring dan daring). Hal tersebut menyebabkan pemahaman mengenai materi bimbingan teknis yang disampaikan para narasumber kurang dapat diterima secara optimal oleh para peserta kegiatan yakni lembaga calon penyelenggara program PKK dan PKW, terutama yang dilakukan secara daring.
6. Terjadi keterlambatan penetapan tahap akhir hingga bulan Oktober karena menunggu daerah afirmasi.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mengoptimalkan dan membagi tugas serta peran lembaga penerima bantuan dalam melakukan pendampingan rintisan usaha sesuai dengan rincian rintisan usaha yang dibuat peserta didik, selain itu dengan memberikan edukasi kepada lembaga penerima bantuan PKW bahwa pendampingan peserta didik lulusan PKW seharusnya dilakukan bersama-sama antara lembaga, dunia kerja, dan juga platform digital.
2. Meminta kepada pihak dekranas untuk mengganti dengan provinsi atau kab kota yang siap melaksanakan program PKW.
3. Ada program PKK, lembaga penyelenggara diberikan kelonggaran untuk penempatan peserta didik ke dunia kerja dalam kurun waktu satu tahun setelah selesai uji kompetensi sesuai dengan definisi operasional dalam renstra.
4. Dilakukan *coaching* dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan PKK dan PKW baik dari laporan teknis pelaksanaan maupun administrasi keuangan.
5. Memfasilitasi ruang diskusi bagi lembaga melalui *group whatsapp*.
6. Untuk PKK jadwal pembelajaran dipadatkan hingga sampai uji kompetensi dan penempatan kerja sebelum akhir desember, dan untuk PKW dipadatkan hingga merintis usaha sendiri.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan kursus dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan penerapan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja.
2. Meningkatkan jumlah instruktur kursus dan pelatihan vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi, serta pimpinan kursus dan pelatihan vokasi yang mengikuti pelatihan manajerial bisnis berbasis industri.
3. Meningkatkan jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri, serta pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan kompetensi manajerial berbasis industri.
4. Melakukan *coaching* dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan PKK dan PKW pada aplikasi banper baik laporan teknis maupun administrasi keuangan serta melakukan bimbingan teknis implementasi penyelenggaraan program PKK dan PKW.
5. Lembaga penyelenggaraan diberikan kelonggaran untuk penempatan peserta didik ke dunia kerja dalam kurun waktu satu tahun setelah selesai uji kompetensi dan lembaga masih dapat mengupdate tracer study di aplikasi meskipun sudah mengunci laporan akhir.
6. Meningkatkan peran organisasi mitra dalam penyelenggaraan kerja sama lembaga permodalan dan mitra pemasaran dengan lembaga program penyelenggaraan PKW.
7. Melakukan koordinasi dengan Dekranas untuk memilih provinsi atau kabupaten/kota yang siap untuk melaksanakan program PKW.
8. Melakukan pendampingan pasca pelaksanaan PBjL untuk memetakan hasil dan menggali permasalahan untuk menemukan pola pelaksanaan PBjL di lembaga kursus dan pelatihan yang ideal.
9. Pemberian penguatan materi pembelajaran terkait dengan perubahan pola pikir sebagai wirausaha.

IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Lingkup satuan pendidikan vokasi adalah SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP bidang vokasional.

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar, yaitu guru, siswa dan interaksi antara keduanya, serta didukung oleh berbagai unsur-unsur pembelajaran, meliputi kurikulum yang sudah diselaraskan dengan dunia kerja, metode pembelajaran (PBL, Tefa, CBL, CML), dan sarana prasarana yang menunjang, termasuk *platform* digital. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Kerja sama Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja meliputi:

1. Satuan Pendidikan Vokasi yang belum pernah melakukan kerja sama dengan dunia kerja.
2. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah bermitra dengan dunia kerja, tetapi perlu diperluas jumlah mitranya.
3. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah melaksanakan kerja sama, dan perlu ditindak lanjuti dengan pola kemitraan berkelanjutan dalam bentuk program kegiatan nyata, yang dapat mendorong terwujudnya link and match.

Formula perhitungan untuk IKP 2.4 adalah dengan menjumlahkan jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas dengan jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi (8 + i) serta jumlah satuan pendidikan vokasi yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja kemudian dibagi dengan jumlah satuan pendidikan vokasi dan dikalikan 100%.

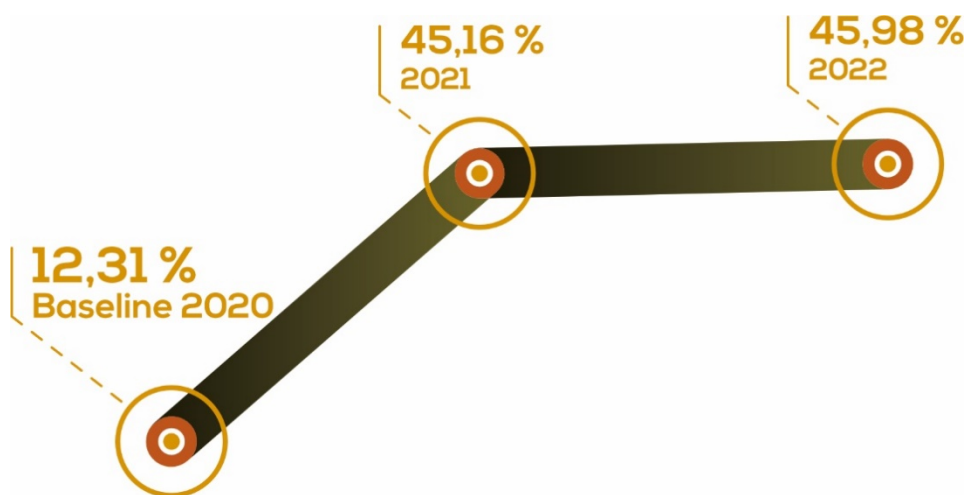
$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas + yang mengimplementasikan 8+i + yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Matriks Indikator Kinerja 2.4

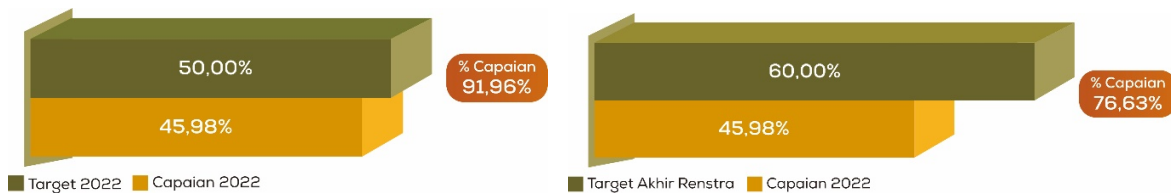
Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Target 2022			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	45,16	50	45,98	91,96	60	76,63

Capaian IKP 2.4 pada tahun 2022 diperoleh dari perhitungan penjumlahan satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas, jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan 8+i, dan jumlah satuan pendidikan yang memiliki kerjasama dengan dunia kerja, diperoleh hasil sebanyak 12.684 satuan pendidikan, kemudian dibagi dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 27.585 satuan pendidikan, sehingga mendapatkan capaian sebesar 45,98%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 45,16%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,82%. Namun capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 50%, atau baru mencapai 91,96%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini baru mencapai 76,63%. Agar target akhir renstra dapat tercapai, tentunya diperlukan inovasi dan strategi untuk mencapai target akhir renstra pada tahun 2024.



Gambar 3.29 Grafik Trend Capaian IKP 2.4.



Gambar 3.30 Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.31 Pelatihan Guru Bidang Budidaya Perikanan



Gambar 3.32 Pelatihan Guru Bidang Pengolahan Makanan Surimi



Gambar 3.33 Pelatihan Guru Bidang *Periodic Maintenance*

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Pelaksanaan *tracer study* untuk lulusan SMK dengan tingkat keterisian data pada aplikasi 529.756 alumni SMK atau 32,66% dari 1.622.208 orang alumni SMK tahun 2021, 9.161 SMK atau 66,68% dari 13.738 SMK, dan 5.301 mitra industri.
2. Penandatanganan 219 kesepakatan dari SMK PK Skema Pemadanan Dukungan (SPD) dengan industri, dan 25 kesepakatan antara Ditjen Pendidikan Vokasi dengan industri.
3. Pembaruan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pendidikan Vokasi dengan beberapa DUDI.
4. Guru kejuruan dan kepala sekolah yang mendapatkan upskilling dan reskilling berstandar industri yang dilaksanakan oleh BBPPMPV/BPPMPV sebanyak 9.545 orang, dengan rincian
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 1.083 orang
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 2.649 orang
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 1.808 orang
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 1.975 orang
 - Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 785 orang
 - Pertanian sebanyak 1.245 orang
5. Instruktur kursus yang mendapatkan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan yang dilaksanakan oleh BBPPMPV/BPPMPV sebanyak 471 orang, dengan rincian
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 146 orang
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 70 orang
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 68 orang
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 70 orang
 - Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 38 orang
 - Pertanian sebanyak 34 orang
6. Dosen yang mendapatkan pelatihan kompetensi berbasis kerjasama industri yang dilaksanakan oleh BBPPMPV/BPPMPV sebanyak 457 orang, dengan rincian
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 107 orang
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 70 orang
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 71 orang
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 73 orang
 - Bidang Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 39 orang
 - Pertanian sebanyak 54 orang

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. *Tracer study* terkendala dengan perubahan metadata rapor pendidikan yang sangat dinamis, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antara pengolah Data, Dit. Mitras DUDI dan Tim Walidata di Rapor Pendidikan.
2. Kesulitan dalam melakukan sinkronisasi data akibat terbatasnya *database* industri yang menjadi basis informasi untuk melaksanakan program dan kebijakan pendidikan vokasi terkhusus di bidang kemitraan dan penyelarasan.
3. Peserta diklat *upskilling* dan *reskilling* untuk guru kejuruan tidak menuntaskan keikutsertaan dalam pelatihan karena adanya diklat lain pada waktu yang bersamaan.
4. Keterbatasan instruktur kursus pada beberapa bidang keterampilan, sehingga diklat yang dilaksanakan hanya terbatas pada bidang keterampilan tertentu.
5. Pada pelatihan dosen PTV, diklat yang ditawarkan masih terbatas pada beberapa bidang keahlian tertentu sehingga tidak dapat mengakomodir bidang keahlian lainnya yang dibutuhkan.
6. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program, bahkan ada beberapa program yang tidak dapat terlaksana.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

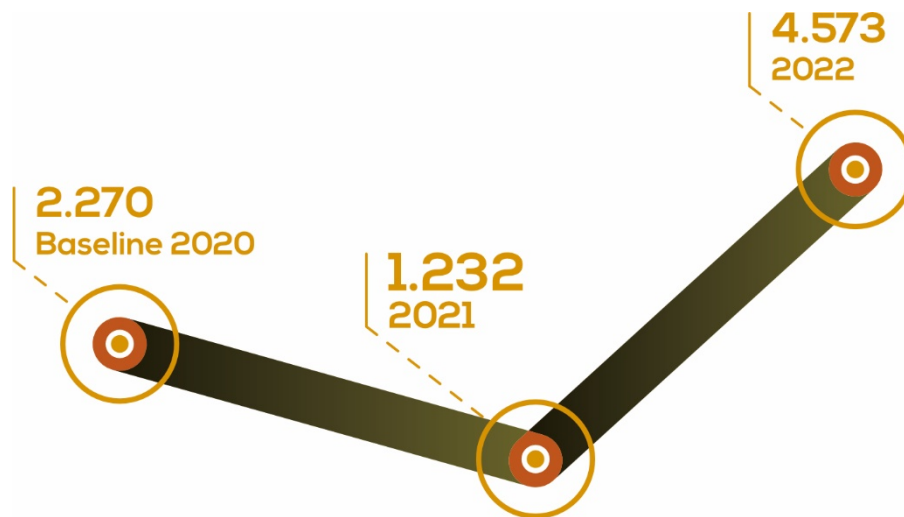
1. Pada kegiatan *tracer study* dilakukan Koordinasi dengan tim pengolah data secara daring serta koordinasi dengan tim rapor pendidikan Ditjen vokasi setiap hari Rabu sore.
2. Membangun sistem terintegrasi yang dapat menghimpun direktori industri beserta *database* kemitraan industri dengan satuan pendidikan vokasi.
3. Pada pelatihan guru kejuruan dan instruktur kursus dilakukan penggantian peserta yang mengundurkan diri dengan peserta lain yang memenuhi persyaratan.
4. Pada pelatihan dosen dilakukan penambahan pelatihan pada bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan PTV.
5. Mengganti metode pelaksanaan program misalnya melaksanakan pelatihan secara daring maupun *blended* sehingga memperkecil *unit cost* dan target tetap tercapai.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Pembinaan satuan pendidikan vokasi baru dan prodi agar sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja.
2. Peningkatan kapasitas *manajerial* dan *leadership* kepala lembaga pendidikan vokasi, dukungan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja terhadap pendidikan vokasi melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta jumlah kemitraan dan penyalarsan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi.
3. Peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Peningkatan jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan, dan model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja.
5. Membuka ruang kerja sama dengan dunia kerja, yang berperan secara langsung dalam memberikan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan standar industri.
6. Membentuk Forum Pengarah Vokasi yang bertujuan untuk mewujudkan ekosistem dunia kerja yang secara aktif memberikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pengembangan pada pendidikan vokasi.
7. Mempertegas aturan yang telah ditetapkan diuknis untuk mengantisipasi peserta mengundurkan diri di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan.
8. Mengidentifikasi bidang keahlian yang dibutuhkan oleh dosen di wilayah kerja masing-masing balai untuk menetapkan pelatihan yang akan ditawarkan.

Sasaran Program 3. Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi

Sampai dengan tahun 2022, peningkatan riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian 2021, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Gambar 3.34 Grafik Trend capaian baseline 2020, 2021, dan 2022

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran program ini diantaranya dengan memberikan intensif kepada dosen/peneliti serta pemberian bantuan pemerintah untuk pelaksanaan riset melalui program *matching fund*.

IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat

Luaran penelitian yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Kriteria penerapan di masyarakat yaitu:

1. Karya Ilmiah

Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

2. Karya Terapan

- Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk *prototipe*) mendapat paten nasional, mendapat pengakuan asosiasi, dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau terdapat kemitraan antara investor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional; dan
- Pengembangan invensi dengan mitra didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3. Karya Seni

Karya Visual, Audio, Audio-visual, atau pertunjukan merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah; Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah; Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik merupakan karya asli, karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional, karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau karya dibiayai oleh industri atau pemerintah; dan Karya preservasi mendapat *sponsorship* /pendanaan dari organisasi nonpemerintah, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

Formula perhitungan untuk IKP 3.1 adalah dengan menghitung jumlah penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat. Satuan yang digunakan adalah karya dengan metode perhitungan nonkumulatif.

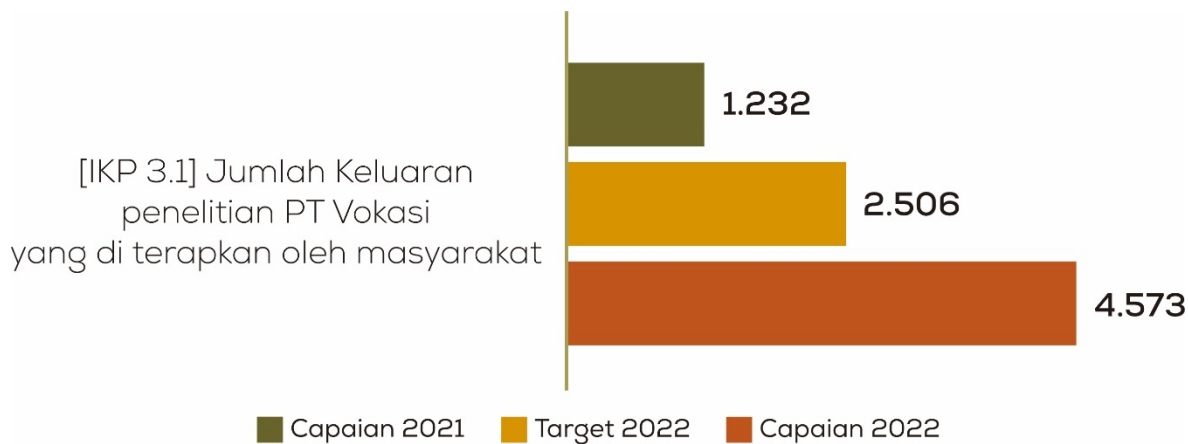
Tabel 3.7 Matriks Indikator Kinerja 3.1

Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	Target 2022			Realisasi s.d Tahun 2022	Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%			
Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	1.232	2.506	4.573	182,48	8.075	11.341	71,20

Capaian IKP 3.1 pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4.573 karya, sedangkan capaian tahun 2021 sebanyak 1.232 karya, maka capaian mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 3.341 karya. Capaian tersebut juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebanyak 2.506 karya, dengan persentase sebesar 182,48%. Ketercapaian target tidak lepas dari dukungan Perguruan Tinggi Vokasi yang mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang didanai oleh perguruan tinggi (mandiri), tidak hanya mengandalkan dana insentif dari Direktorat Teknis.

Kemudian untuk membandingkan capaian terhadap target akhir renstra tahun 2024, perlu menjumlahkan capaian dari awal tahun renstra sampai dengan tahun berjalan. Maka, capaian pada IKP 3.1 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 8.075 karya, dengan rincian, baseline di tahun 2020 sebanyak 2.270 karya, capaian di tahun 2021 sebanyak 1.232 karya dan capaian 2022 sebanyak 4.573 karya. Jika dibandingkan dengan target

akhir renstra tahun 2024 sebanyak 11.341 karya, IKP ini baru tercapai sebesar 71,20%. Tentunya diperlukan inovasi untuk mencapai target tersebut.



Gambar 3.35 Grafik perbandingan capaian 2022 dan target akhir renstra

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.36 Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Gambar 3.37 Sosialisasi intensif Kekayaan Intelektual



Gambar 3.38 Bimtek Penyusunan Dokumen Permohonan Paten

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Pemberian insentif kepada dosen/peneliti untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) yang menghasilkan 133 KI, selain itu juga terdapat Kekayaan Intelektual yang didanai oleh perguruan tinggi (mandiri) adalah sebanyak 2261 KI, data tersebut termasuk jumlah kekayaan intelektual diluar Paten dan Paten Sederhana (sumber data SINTA).
2. Pemberian bantuan pemerintah untuk publikasi Artikel Ilmiah (AI) di jurnal internasional bereputasi dosen vokasi yang didanai dari adalah sebanyak 168 artikel, selain itu juga terdapat publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi yang didanai oleh perguruan tinggi (mandiri) adalah sebanyak 1136 artikel (sumber data SINTA).

3. Pemberian bantuan pemerintah untuk melakukan riset melalui program Kedaireka *Matching Fund* pada 167 Perguruan Tinggi Vokasi bekerjasama dengan 503 mitra melalui pendanaan untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra, agar menghasilkan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan atau terhadap implementasi kebijakan strategis nasional.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Masih terbatasnya luaran penelitian yang siap dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau didaftarkan untuk perlindungan paten.
2. Sebagian peneliti belum mengunggah luaran KI pada aplikasi BIMA sehingga jumlah luaran KI yang teridentifikasi belum maksimal.
3. Program *Matching Fund* terkendala oleh terlambatnya proses identifikasi kebutuhan barang yang mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-5041/Menko/Marvest/PE.05.00/X/2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pemberian bantuan terlambat karena adanya perubahan mekanisme pendistribusian. Mekanisme yang digunakan idealnya melalui realokasi ke pagu dipa penerima, namun proses tersebut melalui proses yang lama sehingga dipilih mekanisme kontrak ke perguruan tinggi penerima, dan pengadaan untuk PT satker dan BLU, melalui mekanisme bantuan pengadaan.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten untuk meningkatkan kemampuan dosen vokasi mendapatkan perlindungan terhadap produk penelitian yang dihasilkan.
2. Melaksanakan workshop pembentukan Sentra KI untuk mendorong Institusi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi ikut aktif dalam memberikan program untuk meningkatkan produktivitas dosen vokasi menghasilkan karya ilmiah khususnya kekayaan intelektual.
3. Melaksanakan bimbingan teknis penulisan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi guna meningkatkan

kemampuan dosen vokasi dalam mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi.

4. Menyelenggarakan program insentif bagi dosen vokasi yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi, guna meningkatkan motivasi dosen vokasi untuk menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
5. Mendorong peneliti untuk mengunggah keluaran KI melalui aplikasi BIMA.
6. Mengidentifikasi alat/bahan yang diperlukan untuk pengadaan yang mengandung TKDN atau PDN sebelum melakukan pengajuan ke satker pusat, sehingga kebutuhan barang impor bisa dihitung lebih awal.
7. Melakukan proses seleksi lebih awal dan melakukan komunikasi dengan pihak DJA terkait kemungkinan proses pendistribusian bantuan MF melalui skema realokasi sehingga penerima memiliki cukup waktu.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Meningkatkan jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah, KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi, dan publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional.
2. Membentuk forum kerja sama Lembaga Pendidikan dengan dunia kerja, agar setiap luaran penelitian PT Vokasi dapat di hilirisasi oleh masyarakat dan diakui oleh industri.
3. Peningkatan kapasitas penelitian sumber daya manusia di pendidikan vokasi agar sesuai dengan standar dunia kerja, serta mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen pimpinan perguruan tinggi vokasi dalam mengembangkan penelitian.
4. Memperluas sosialisasi program terkait dengan luaran penelitian agar tersampaikan ke lebih banyak dosen vokasi.
5. Melaksanakan proses seleksi dengan lebih lebih baik melalui perbaikan instrumen penilaian serta meningkatkan kuota bimbingan teknis.
6. Melakukan pendampingan dan memberi insentif kepada Sentra Kekayaan Intelektual Pendidikan Tinggi Vokasi.

Sasaran Program 4. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Sampai dengan tahun 2022, akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi mendapatkan predikat yang sama dengan tahun 2021, namun mengalami peningkatan nilai dibandingkan dengan tahun 2021, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,

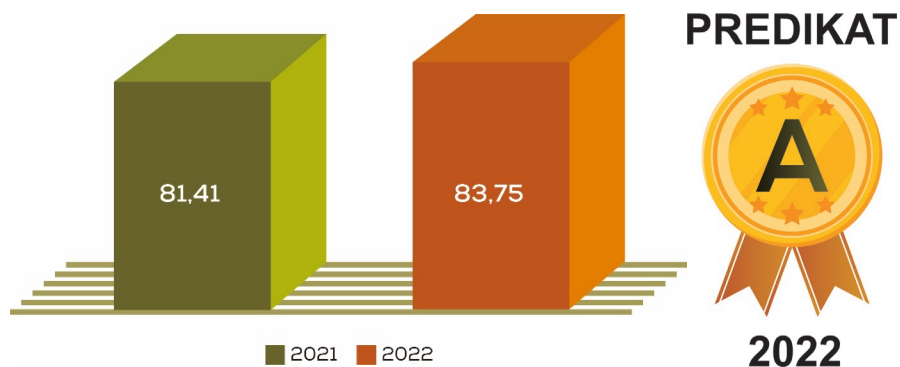
PREDIKAT PREDIKAT



Gambar 3.39 Perbandingan capaian tahun 2021 dan 2022

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan capaian ini diantaranya berkoordinasi dengan biro perencanaan terkait kelengkapan dokumen SAKIP dan penilaian SAKIP yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.

IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi



Gambar 3.40 Grafik perbandingan nilai angka SAKIP Ditjen Vokasi tahun 2021 dan 2022

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 dilakukan dengan evaluasi mandiri didampingi Biro Perencanaan yang kemudian direviu oleh evaluator dari Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Spasikita dengan menggunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Formula perhitungan pada IKP 4.1 ini dengan menjumlahkan nilai pada masing-masing komponen SAKIP yaitu nilai perencanaan kinerja, nilai pengukuran kinerja, nilai pelaporan kinerja, dan nilai evaluasi kinerja. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dapat diunduh pada aplikasi Spasikita setelah dilakukan reviu dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal, Kemendikbudristek. Satuan dari IKP ini adalah predikat dengan klasifikasi sebagai berikut

$$\text{Realisasi IKP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Tabel 3.8 Matriks Indikator Kinerja 4.1

Indikator Kinerja Program	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target	Realisasi	%		
Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Belum dinilai	A	A	A	100	A	100

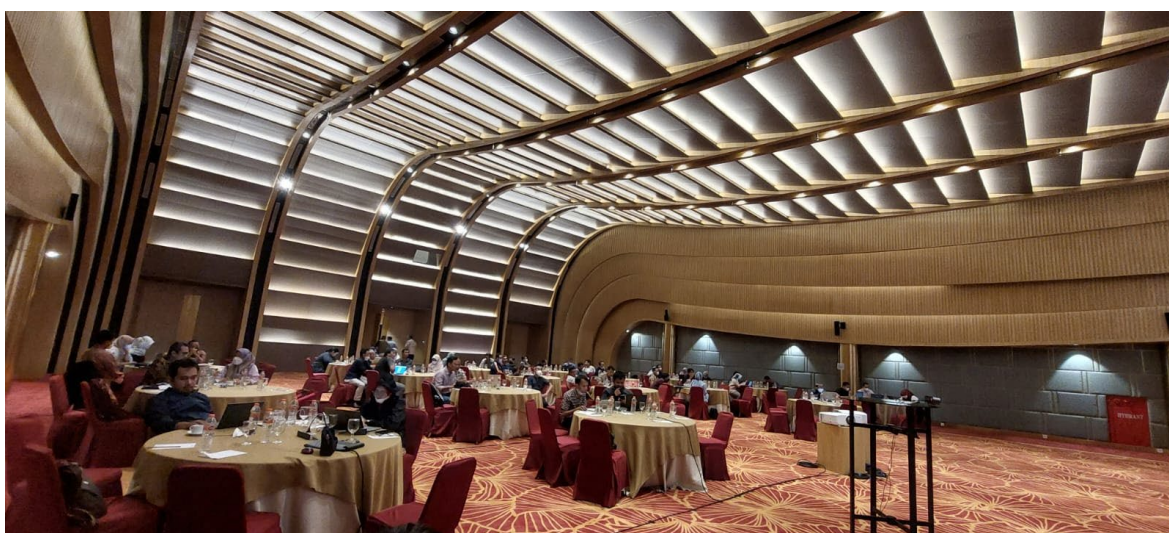
Capaian IKP 4.1 pada tahun 2022 yaitu predikat A dengan nilai 83,75. Berikut rincian nilai pada masing-masing komponen SAKIP,

Tabel 3.9 Rincian nilai pada masing-masing komponen SAKIP

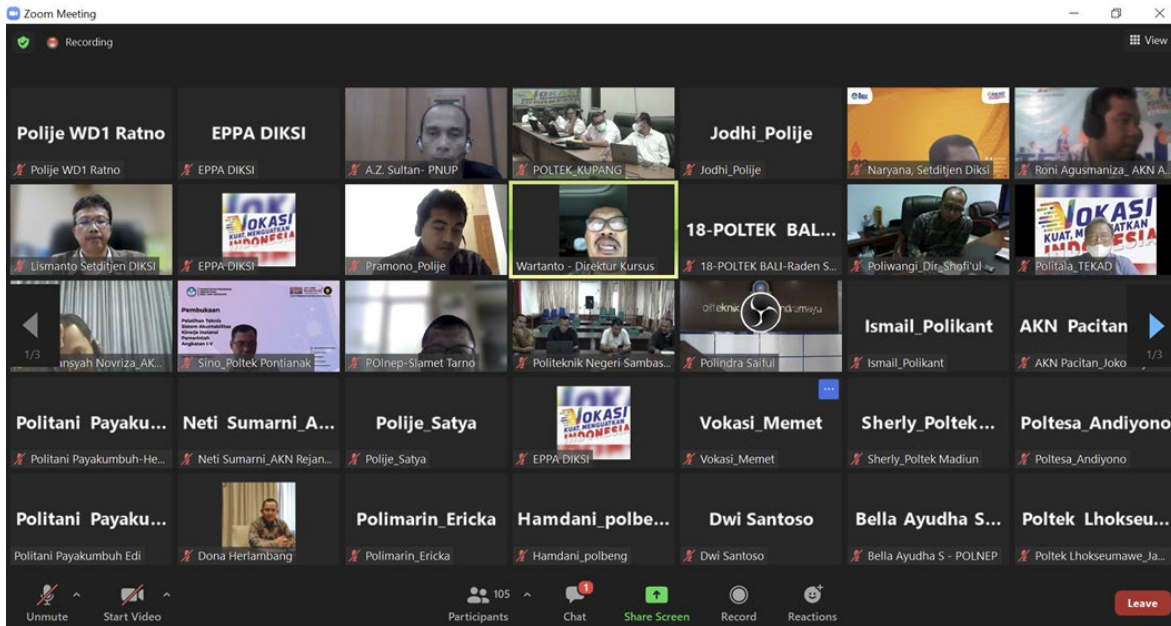
Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
Perencanaan Kinerja	30%	25,5
Pengukuran Kinerja	30%	25,5
Pelaporan Kinerja	15%	12,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	83,75

Secara predikat capaian ini masih sama dengan capaian tahun 2021, namun secara nilai mengalami peningkatan sebesar 2,34 dari nilai tahun 2021 sebesar 81,41. Pada tahun 2020 belum dilakukan penilaian SAKIP pada Ditjen Pendidikan Vokasi karena merupakan Unit Kerja baru. Jika kita bandingkan dengan target akhir renstra 2024, capaian IKP ini sudah memenuhi target, namun tentunya masih perlu banyak perbaikan untuk mendapatkan nilai yang lebih maksimal lagi sebagai bentuk perbaikan yang berkesinambungan.

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.41 Kegiatan Penyusunan LAKIN di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi



Gambar 3.42 Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022



Gambar 3.43 Kegiatan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Pembahasan dan konfirmasi atas hasil evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal.
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan pimpinan satker di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2022.
3. Mensosialisasikan penggunaan menu Lakin pada aplikasi Spasikita kepada seluruh satker di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

4. Melakukan pengukuran kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi serta mendorong semua satker untuk melakukan pengisian pengukuran kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
5. Menyampaikan hasil analisa dan laporan hasil evaluasi AKIP kepada pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Revisi Renstra Kemendikbudristek yang memakan waktu agak lama, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, maupun Pengukuran Kinerja.
2. Pembahasan dan konfirmasi atas hasil evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal dilakukan secara daring dan secara bersamaan dengan seluruh Satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sehingga koordinasi kurang maksimal.
3. Terdapat pembaruan Kertas Kerja Evaluasi Penilaian SAKIP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, sehingga memerlukan perhatian lebih supaya tetap mampu meningkatkan predikat SAKIP.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

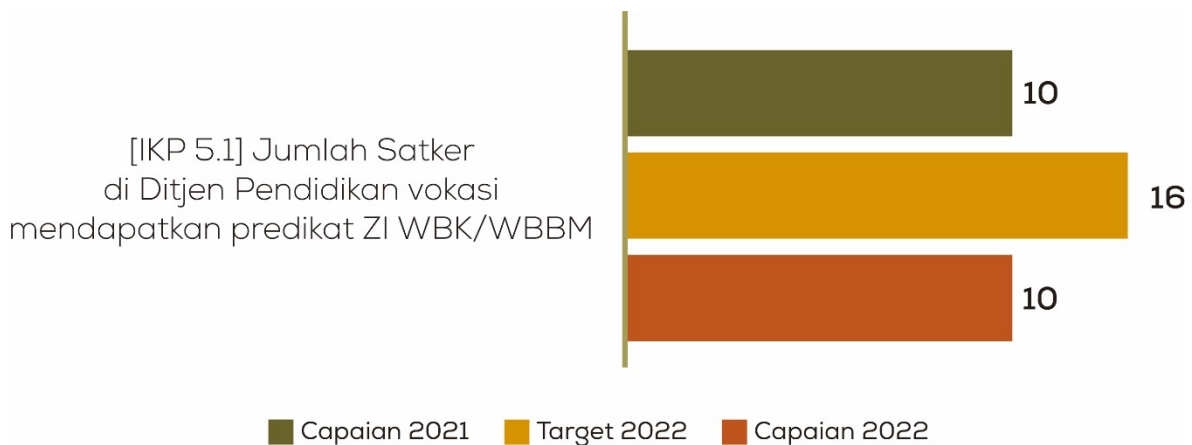
1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh satker agar segera melakukan revisi Renstra dan diselaraskan dengan Permendikbudristek No. 13 tahun 2022 (Untuk Satker Pusat dan dan Balai). dan Untuk Politeknik dan AKN agar disesuaikan dengan Kepmen No. 3/M/2021.
2. Mempercepat proses revisi Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan Renstra Kemendikbudristek.
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek untuk melaksanakan asistensi SAKIP dan memetakan potensi peningkatan predikat SAKIP dengan adanya Kertas Kerja Evaluasi yang baru berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.
4. Melakukan pertemuan bersama Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan, untuk berkoordinasi terkait evaluasi AKIP

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melaksanakan asistensi SAKIP ke semua satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
2. Melakukan pertemuan rutin bersama Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan, untuk berkoordinasi terkait evaluasi AKIP.
3. Mempersiapkan dokumen-dokumen SAKIP dari awal tahun.

Sasaran Program 5. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Sampai dengan tahun 2022, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Gambar 3.44 Grafik Perbandingan capaian IKP antara realisasi 2021, target 2022 dan capaian 2022

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pendampingan penilaian ZI WBK dan WBBM kepada satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

IKP 5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Tabel 3.10 Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapat predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
🗳️ Nilai Sub Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survei 3,60)	15,75 (survei 3,60)
🗳️ Nilai Sub komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	14,00 (survei 3,20)	15,75 (survei 3,60)

Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas WBK adalah:

1. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat menuju WBK.
2. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas WBBM adalah:

1. Satuan kerja tersebut telah mendapat predikat menuju WBK.
2. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang memenuhi kriteria unit berpredikat menuju WBBM.
3. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja. Skor integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat menuju WBBM.
4. Memiliki inovasi layanan yang menyentuh masyarakat dan telah direplikasi oleh satuan kerja lain.

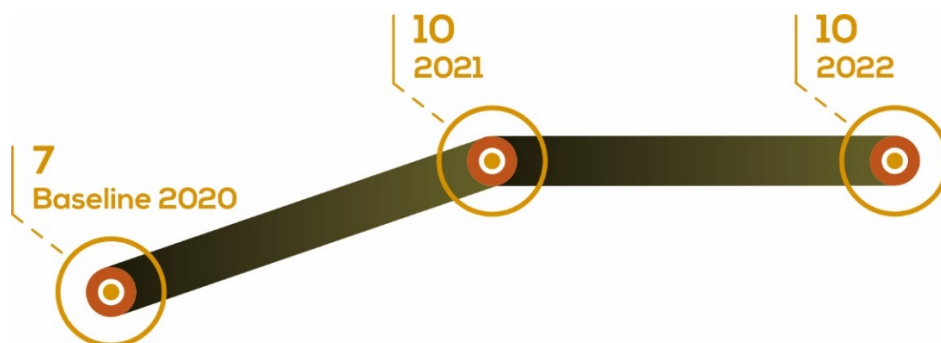
Penilaian dilakukan oleh Kemenpan RB dan hasil akan diumumkan pada bulan Desember setiap tahun. Formula perhitungan pada IKP ini adalah dengan menghitung jumlah satker yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM dengan metode perhitungan kumulatif.

Tabel 3.11 Matriks Indikator Kinerja 5.1

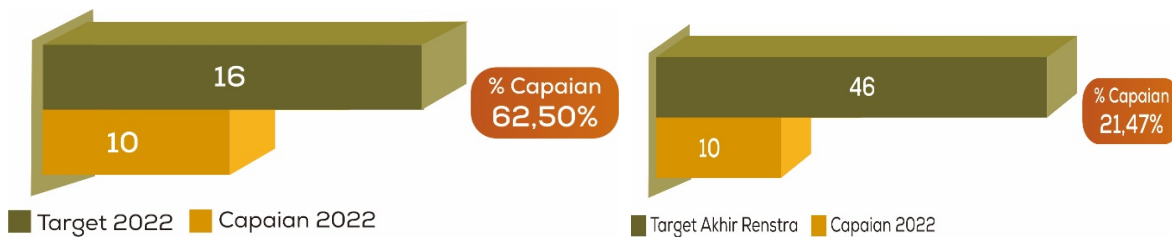
Indikator Kinerja Program	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target	Realisasi	%		
Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	7	10	16	10	62,50	46	21,74

Capaian IKP 5.1 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 9 satker menjadi WBK dan 1 satker menjadi WBBM. Satker yang mendapatkan predikat WBK adalah BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Seni dan Budaya, BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, dan Politeknik Negeri Batam, sedangkan yang mendapatkan predikat WBBM adalah BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. Capaian tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 dan belum memenuhi target tahun 2022 sebanyak 16 satker atau baru mencapai 62,50%. Ketidaktercapaian ini salah satunya disebabkan oleh adanya pembatasan kuota pengusulan calon satuan kerja berpredikat ZI WBK/WBBM pada tahun 2022 oleh Kemenpan RB sebanyak 15 (lima belas) kuota di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan pembagian kuota sebanyak 1 (satu) satuan kerja.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 46 satker, maka untuk IKP ini baru mencapai 21,74%. Salah satu upaya strategi yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut adalah dengan memberikan pelatihan kepada asesor yang akan melakukan pendampingan kepada satuan kerja yang diusulkan menjadi satker WBK/WBBM dan memetakan kondisi real satuan kerja, sehingga mempermudah penilaian.



Gambar 3.45 Grafik Trend Capaian IKP 5.1.



Gambar 3.46 Grafik perbandingan target 2022, capaian 2022 dan target akhir renstra.

Dokumentasi kegiatan



Gambar 3.47 Pendampingan penilaian ZI WBBM di BMTI



Gambar 3.48 Pendampingan penilaian ZI WBBM di BMTI



Gambar 3.49 Pendampingan penilaian ZI WBBM di BMTI

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Mendampingi BBPPMPV BMTI dalam proses pelaksanaan pembangunan ZI WBBM, pengisian LKE dan pemenuhan bukti dukung, dan pendampingan saat dikunjungi Kementerian PANRB dalam

- rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas untuk satker yang diajukan menjadi ZI WBBM.
2. Mendampingi satuan kerja dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM selama tahun 2022 sebagai persiapan penilaian tahun 2023.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan RBI Ditjen Pendidikan Vokasi.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Ditetapkannya kebijakan terkait kuota pengusulan calon satuan kerja berpredikat ZI WBK/WBBM sebanyak 15 (lima belas) satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada pertengahan tahun 2022. Hal tersebut sesuai dengan Surat Nomor 34682/A.A4/OT.01.03/2022 Tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM Tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021, SE MenPANRB Nomor 15 Tahun 2022, serta Surat Deputi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/PW.00/2022, tanggal 24 Mei 2022.
2. Tugas RBI hanya sebagai tugas tambahan sehingga sulit untuk dimintai komitmen dalam pelaksanaan tugas RBI.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

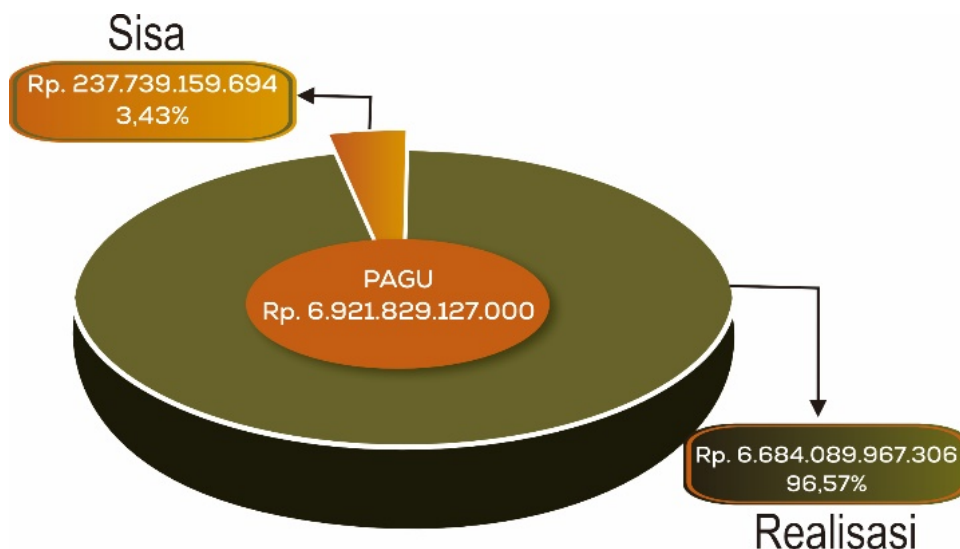
1. Mendampingi pelaksanaan persiapan penilaian oleh TPI kepada 23 satuan kerja.
2. Mengajukan 3 (tiga) satuan kerja dengan nilai LKE minimal 90 dan dianggap berpotensi lolos untuk diajukan penilaian oleh TPI.
3. Melaksanakan kembali Bimtek terkait pengisian LKE ZI WBK/WBBM kepada satker.
4. Mempercepat jadwal pelaksanaan asesmen terhadap satuan kerja.
5. Mendorong secara terus-menerus dalam membangun Tim Kerja RB Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai modal peningkatan kualitas PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) maupun hasil PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
6. Mengusulkan agar reformasi birokrasi dijadikan salah satu indikator kinerja yang diukur pada renstra.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Menetapkan asesor pendampingan ZI WBK/WBBM, serta memberikan pelatihan kepada asesor agar dapat melakukan pendampingan kepada satuan kerja dan memetakan kondisi real satuan kerja, sehingga mempermudah penilaian.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan satuan kerja menuju ZI WBK/WBBM.
3. Memverifikasi LKE satker di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi melalui aplikasi SIAZIK sebagai proses awal pengusulan satker yang akan diajukan mendapatkan ZI WBK/WBBM tahun 2023.

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja revisi adalah sebesar Rp6.921.829.127.000 dan terealisasi sebesar Rp6.684.089.967.306 dengan persentase 96,57%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) SP dengan 8 (delapan) IKP yang terdistribusi ke 62 (lima puluh sembilan) satker, yaitu 5 (lima) satker Pusat, 49 (empat puluh tujuh) Politeknik dan AKN, dan 7 (tujuh) Balai Besar/Balai.



Gambar 3.50 Grafik Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	412.315.648.000	391.451.470.477	94,94
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	1.509.638.947.000	1.498.219.458.875	99,24
		2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1.2x UMP	1.924.659.844.000	1.788.552.528.787	92,93
		2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	266.800.521.000	265.295.010.140	99,44
		2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	224.947.511.000	219.718.147.581	97,68
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	151.237.441.000	147.576.656.567	97,58
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	5.083.912.000	5.072.011.700	99,77
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	2.427.145.303.000	2.368.204.683.179	97,57
Jumlah			6.921.829.127.000	6.684.089.967.306	96,57

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Ditjen Pendidikan Vokasi telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp152.704.998.931 dengan rincian sebagai berikut,

1. Pada IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP, berhasil mendapatkan persentase capaian sebesar 108,58% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.498.219.458.875, sedangkan sesuai perencanaan capaian ini seharusnya menghabiskan anggaran sebesar Rp1.509.638.947.000. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp11.419.488.125 pada IKP ini.
2. Pada IKP 2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP, berhasil mendapatkan persentase capaian sebesar 94,88% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.788.552.528.787, sedangkan sesuai perencanaan capaian ini seharusnya menghabiskan anggaran sebesar Rp1.924.659.844.000. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp136.107.315.213 pada IKP ini.
3. Pada IKP 2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha, berhasil mendapatkan persentase capaian sebesar 117,50% dengan realisasi anggaran sebesar

Rp265.295.010.140, sedangkan sesuai perencanaan capaian ini seharusnya menghabiskan anggaran sebesar Rp266.800.521.000. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp1.505.510.860 pada IKP ini.

4. Pada IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat, berhasil mendapatkan persentase capaian sebesar 182,48% dengan realisasi anggaran sebesar Rp147.576.656.567, sedangkan sesuai perencanaan capaian ini seharusnya menghabiskan anggaran sebesar Rp151.237.441.000. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp3.660.784.433 pada IKP ini.
5. Pada IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi, berhasil mendapatkan persentase capaian sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.072.011.700, sedangkan sesuai perencanaan capaian ini seharusnya menghabiskan anggaran sebesar Rp5.083.912.000. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp11.900.300 pada IKP ini.

***Cross Cutting*/Kolaborasi Program Ditjen Pendidikan Vokasi**

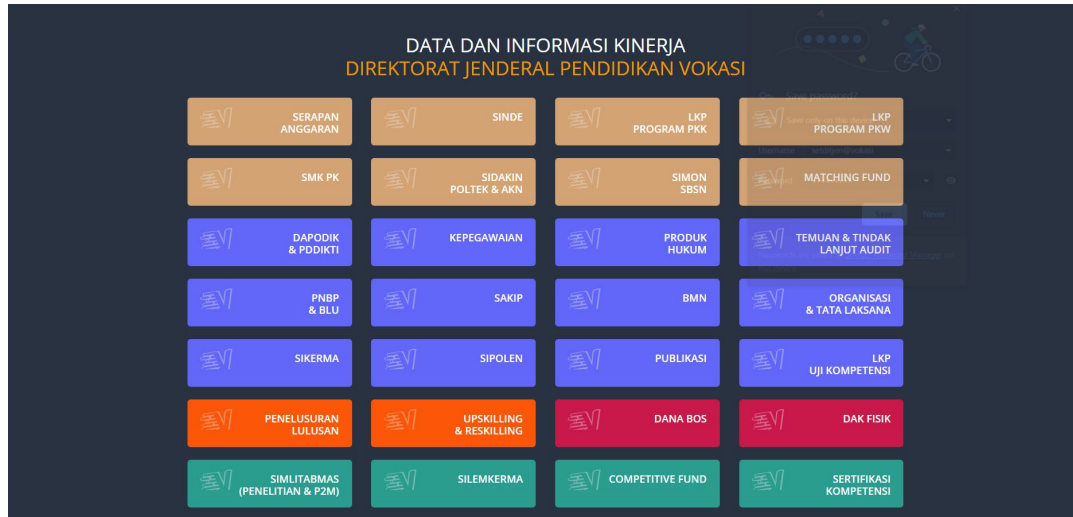
Dalam rangka pelaksanaan program *link and match* 8+i, Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan kolaborasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendikbudristek, hal ini tentunya dilakukan untuk mendorong ketercapaian program-program Ditjen Pendidikan Vokasi. Adapun kolaborasi yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi salah satunya yaitu program *matching fund*. Kolaborasi yang dilakukan untuk program *matching fund* adalah panduan pelaksanaan *matching fund* bersama, yaitu untuk satu perguruan tinggi dengan satu mitra DUDI, satu perguruan tinggi dengan beberapa mitra DUDI, beberapa perguruan tinggi dengan satu mitra DUDI, dan beberapa perguruan tinggi dengan beberapa mitra DUDI. Selain itu, *platform* bersama yang digunakan yaitu aplikasi Kedaireka. *Platform* ini bertujuan untuk membuka wadah kolaborasi agar proses inovasi, invensi, dan dapat bergerak lebih cepat ke sebuah produk yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
2. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah diantaranya pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Kolaborasi yang dilakukan untuk pelaksanaan BOS adalah penyusunan juknis, penetapan sasaran dan pelaksanaan pemantauan.

3. Kolaborasi dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan diantaranya penyusunan bersama instrumen evaluasi SMK PK, adaptasi kurikulum merdeka di SMK, perencanaan berbasis data di SMK, digitalisasi sekolah di SMK, dan kemitraan di industri dengan SMK.
4. Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan diantaranya kolaborasi untuk pelaksanaan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Revitalisasi Perkapalan Tradisional.
5. Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan diantaranya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB) yang dikembangkan oleh Ditjen GTK dan dimanfaatkan untuk penjangkaran peserta pelatihan di BBPPMPV/BPPMPV.
6. Kolaborasi dengan Sekretariat Jenderal diantaranya kolaborasi dengan Pusdatin terkait penyusunan instrumen aplikasi *tracer study*, Dapodik SMK dan PDDIKTI dan kolaborasi dengan Biro Perencanaan terkait pengembangan *dashboard* Pendidikan Vokasi.
7. Kolaborasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diantaranya kolaborasi pembinaan terkait Tata Naskah Dinas.
8. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam program Jalur Rempah dengan merevitalisasi kapal kayu tradisional untuk Menunjang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan.

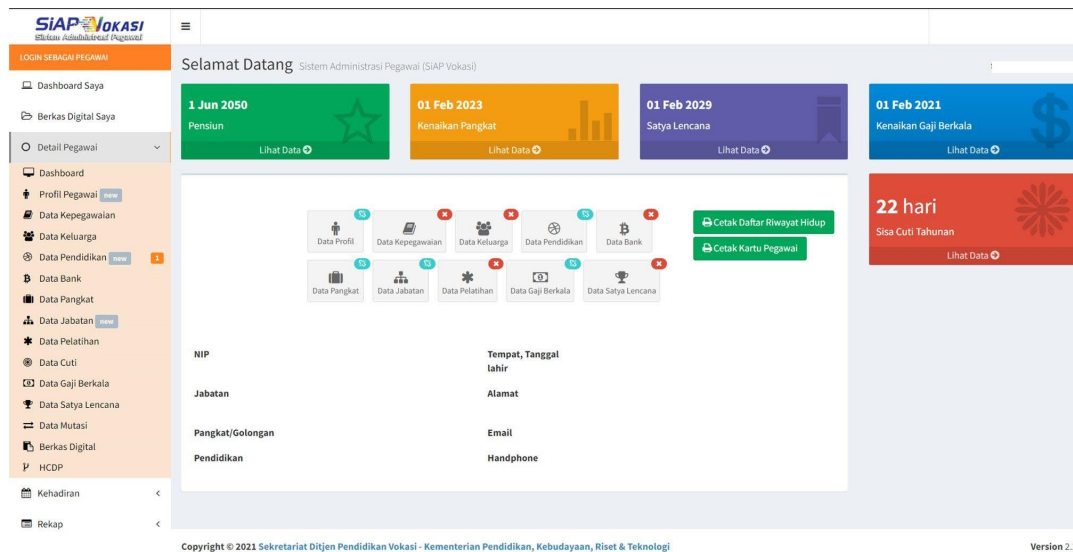
Inovasi yang Dilakukan

1. Pengembangan *Dashboard* Pendidikan Vokasi melalui aplikasi kinerja.kemdikbud.go.id yang digunakan untuk memberikan informasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi antara lain memuat informasi tentang serapan anggaran, SINDE, program prioritas, Dapodik dan PDDIKTI, *tracer study* serta program lainnya pada Pendidikan Vokasi. Pengembangan *Dashboard* Ditjen Pendidikan Vokasi *Dashboard* ini membuat link dan perbaikan aplikasi di setiap satker (Sekretariat, Dit. Kursus, Dit SMK, Dit. Mitras, Dit. Akademik PTV, Dit. Kelembagaan PTV dan Aplikasi lain yang relevan) diintegrasikan dalam satu *Dashboard* Kinerja Direktorat Jenderal. *Dashboard* tersebut sudah menampilkan 28 fitur kinerja dan beberapa masih proses pengisian capaian dan pengembangan tampilan *dashboard*. Manfaat pengembangan ini adalah untuk mengetahui dan memonitoring kinerja dan *update* program secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu juga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan dan pembinaan di setiap satker.



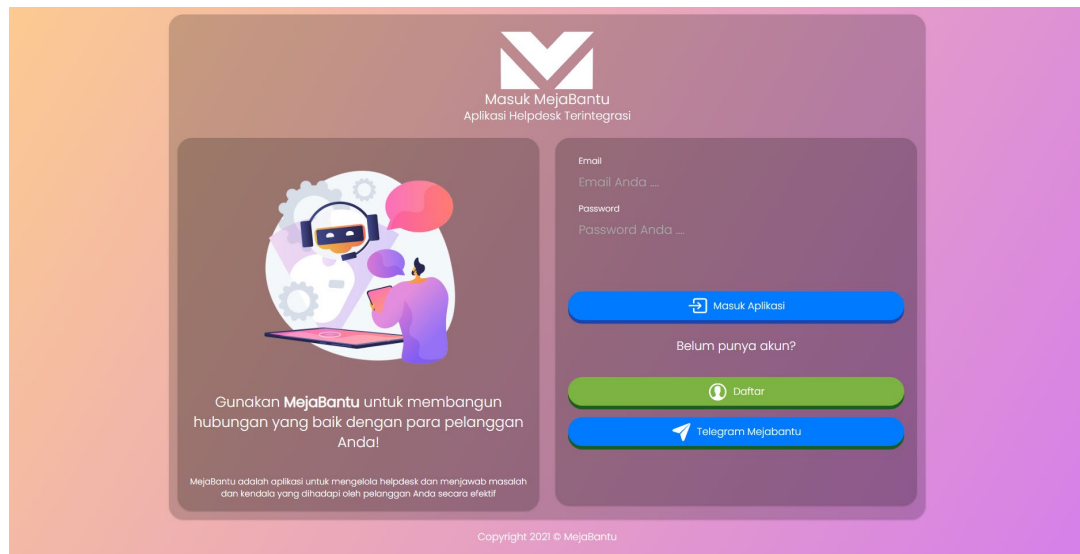
Gambar 3.51 Aplikasi *Dashboard Kinerja*

2. Pengembangan aplikasi SIAP untuk mempermudah proses pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi diantaranya untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penghargaan satya lencana dan pengajuan cuti.



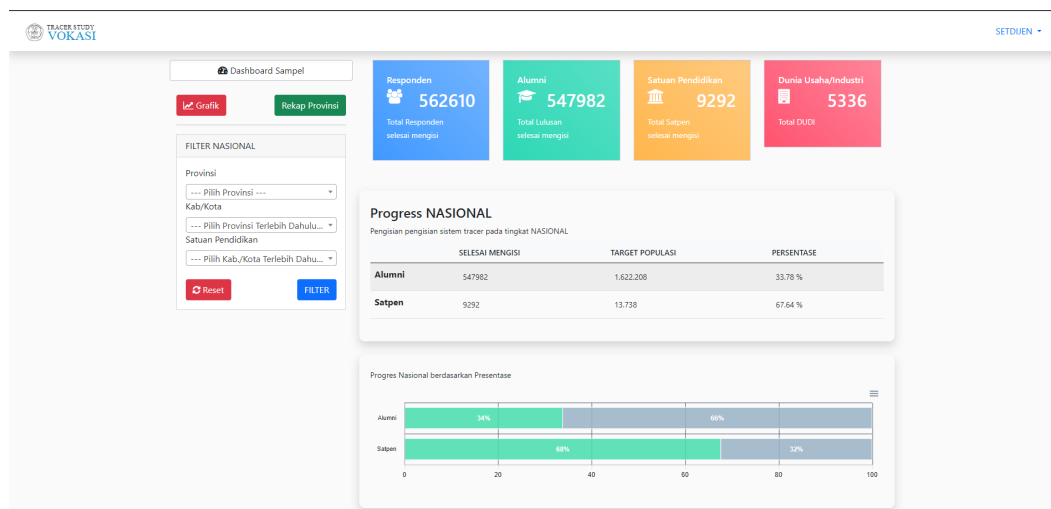
Gambar 3.52 Aplikasi SIAP

3. Pengembangan Dashboard *Helpdesk/Meja Bantu Dapodik* Vokasi yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan konsultasi antara satuan pendidikan vokasi (SMK dan LKP) dalam pemutakhiran DAPODIK.



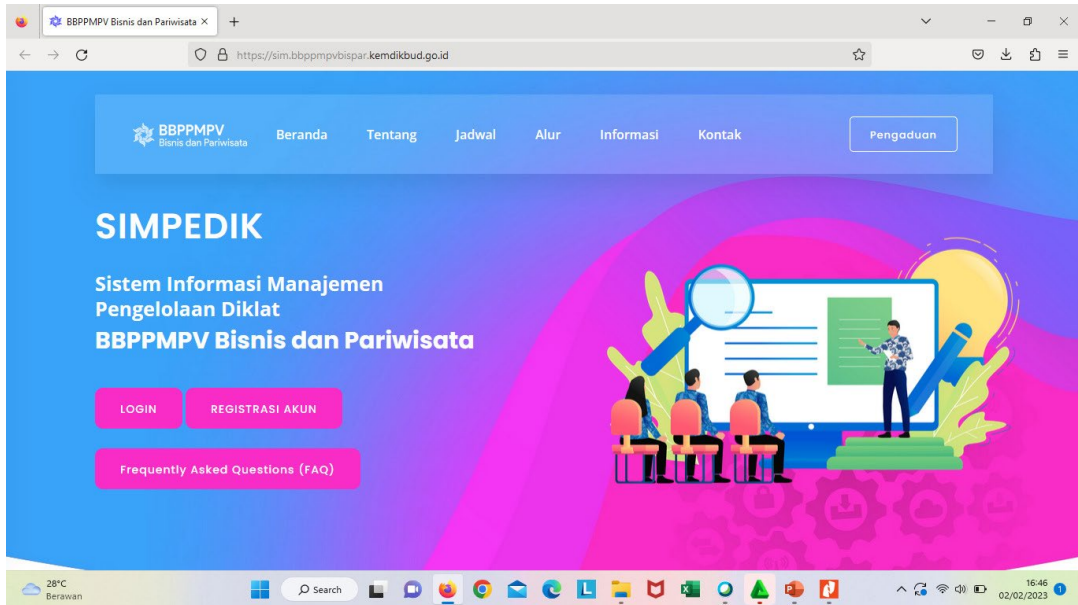
Gambar 3.53 Aplikasi Meja Bantu

4. Menerjemahkan kebutuhan Data dan Informasi bagi para pengguna dalam bentuk instrumen dalam aplikasi *Tracer Study*, diantaranya a. Presentase Lulusan yang Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha (BMW); b. Detail Lulusan yang Melanjutkan Studi; c. Keselarasan Kompetensi Keahlian dengan Bidang Pekerjaan; d. Presentase Upah Lulusan berdasarkan UMP; dan e. Waktu Tunggu Lulusan.



Gambar 3.54 Aplikasi Tracer Study

5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Diklat (Simpedik) pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang memuat layanan Diklat internal dan layanan Data Sekolah Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bidang Bisnis dan Pariwisata.



Gambar 3.55 Aplikasi Simpedik

Penghargaan yang Dicapai

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan penghargaan sebagai berikut:









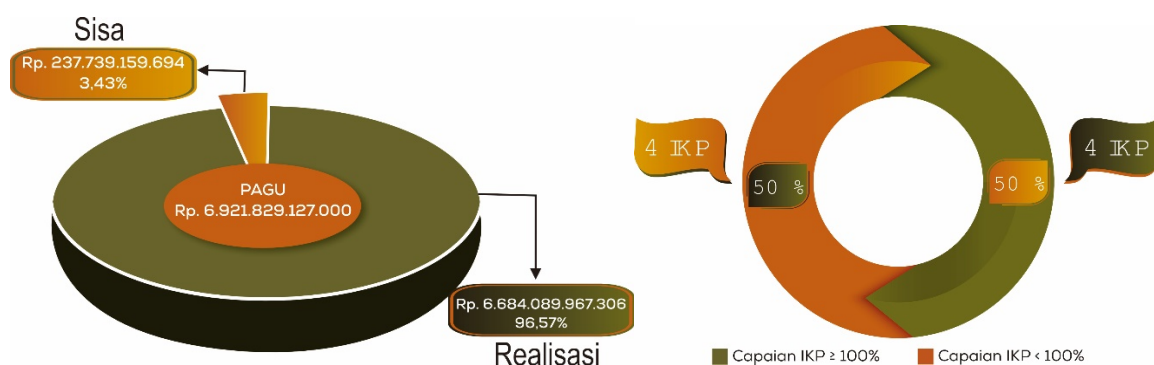






BAB IV PENUTUP

Sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, terdapat 5 Sasaran Program yang didukung dengan 8 Indikator Kinerja Program. Dari 8 Indikator Kinerja Program, sebanyak 4 Indikator Kinerja Program telah tercapai melebihi target yang ditetapkan, sedangkan 4 Indikator Kinerja Program masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 5.1 Grafik Realisasi Anggaran dan Capaian IKP

Langkah-langkah dan Strategi :

1. Memperkuat kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan seperti mendatangkan dosen tamu dari industri, melakukan sharing terhadap sumber daya, pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, melakukan magang dengan industri, serta meningkatkan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan pelatihan secara *blended* dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, apakah diperlukan tatap muka atau tidak. Untuk pembelajaran yang bersifat teori dilakukan secara daring, namun untuk praktek dilakukan secara luring.
3. Melibatkan industri dalam proses pengembangan pembelajaran, tata kelola serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan vokasi untuk membantu proses transfer *knowledge*.

4. Mendorong keberlanjutan model pembelajaran berbasis *teaching factory* pada satuan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik menghadapi dunia usaha dan dunia industri.
5. Mendorong satker untuk mengidentifikasi alat/bahan yang diperlukan untuk pengadaan, dan memprioritaskan TKDN atau PDN, serta mempercepat proses izin ke eselon 1 untuk penggunaan produk impor.
6. Meningkatkan kapasitas penelitian sumber daya manusia pendidikan vokasi sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri.
7. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen pimpinan perguruan tinggi vokasi dalam mengembangkan penelitian.

LAMPIRAN

1. PK Awal dan PK Akhir
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Keterangan Reviu



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wikan Sakarinto

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Maret 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Wikan Sakarinto

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	12.95
2	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	39.18
		[IKP 2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	44.37
		[IKP 2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	53.37
		[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	50
3	[SP 3] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	2506
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	16

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 2.426.269.797.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 615.789.602.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Rp. 37.061.455.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 100.818.410.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp. 328.891.918.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 1.631.627.537.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 82.542.237.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 168.078.391.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 96.772.910.000
		TOTAL	Rp. 5.487.852.257.000

Jakarta, 28 Maret 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Wikan Sakarinto



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kiki Yuliati

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Kiki Yuliati

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	12.95
2	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	39.18
		[IKP 2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	44.37
		[IKP 2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	53.37
		[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	50
3	[SP 3] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	2506
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	16

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 2.432.229.215.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 1.509.638.947.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Rp. 23.641.955.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 266.800.521.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp. 321.901.288.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 1.923.507.280.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 201.305.556.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 151.237.441.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 90.414.360.000
		TOTAL	Rp. 6.920.676.563.000

Jakarta, 29 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Nadiem Anwar Makarim



Kiki Yulianti



**Pengukuran Indikator Kinerja Program
DITJEN PENDIDIKAN VOKASI
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SP 1] Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	12,95	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 12,95	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 11,44	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Upaya peningkatan mahasiswa PT Vokasi melalui berbagai implementasi program yang berdampak langsung maupun tidak langsung antara lain: 1) Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa dalam tahap finalisasi juknis/panduan. 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) telah tersedia panduan/juknis dan saat ini masuk tahap sosialisasi dengan harap banyak PT Vokasi banyak terlibat dan berpartisipasi untuk mendukung persepsi masyarakat terhadap PT Vokasi semakin berkembang. 3) Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) masuk tahap sosialisasi secara masif untuk mendorong minat dan partisipasi mhs PT Vokasi. 4) Proses penyusunan panduan dan petunjuk teknis sertifikasi kompetensi dosen. Untuk IKP Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi yang ditargetkan sebesar 12,95% akan diketahui capaiannya pada Triwulan ke 4. Adapun metode perhitungannya adalah dengan menghitung jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi dibagi dengan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi kemudian dikalikan 100%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Hambatan telah terdeteksi dengan baik diantaranya: 1) Juknis/panduan telah selesai pembahasan namun menunggu tahap proses legalisasi. 2) beberapa anggaran untuk implementasi kegiatan sosialisasi P2MP dan PKM masih diblokir. 3) Juknis sertifikasi kompetensi dosen masih perlu harmonisasi dengan UPT sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi dosen.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi untuk mempercepat implementasi program pada TW 1 berupa: 1) mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dan koordinasi lintas sektor untuk segera melakukan pengurusan buka blokir anggaran. 2) secepatnya melakukan koordinasi dan pembahasan secara tuntas dengan UPT untuk mempercepat harmonisasi juknis sertifikasi kompetensi dosen.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi, hingga triwulan 2 ini capaian masih 0, dan capaian akan terlihat di triwulan 4, dengan menggunakan data dari PDDIKTI. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 1.1 ini yaitu: 1. Program Sertifikasi Kompetensi (Sertikom), yang sudah ditetapkan pada 5 April 2022 untuk 36 PTPPV (Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi) dengan 6.962 mahasiswa, dan sudah disalurkan ke 28 PT sebesar Rp2.905.160.000,- (penyerapan 80%), sedangkan 10 PT belum bisa menerima bantuan karena dana masih terblokir. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), dimana program ini telah dilaksanakan pembukaan pendaftaran proposal P2MD hingga 18 April 2022. Hingga triwulan 2 ini telah dilakukan proses seleksi terhadap proposal untuk tahap 1 dan presentasi proposal, serta pleno pendanaan dan kontrak kerjasama. 3. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), pada triwulan 2 telah dilakukan proses penilaian administrasi oleh reviewer dan pada bulan April 2022, SK Penetapan dan SK KPA (Kuas Pengguna Anggaran) telah terbit dengan pembiayaan kepada 36 PTPPV dengan mahasiswa sebanyak 7.435 orang. Saat ini sedang dilakukan proses seleksi proposal, pleno pendanaan, kontrak kerjasama program PKM PTV bidang Video Gagasan Konstruktif (VGK) untuk tahap 1 dan tahap 2, serta proses seleksi proposal PKM Artikel Ilmiah (AI) dan Gagasan Futuristik Tertulis (GFT).</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Untuk bantuan pemerintah sertifikasi kompetensi sebagian masih ada yang masuk ke komponen program magang mahasiswa, sehingga harus dipindahkan dari komponen magang mahasiswa ke komponen sertifikasi kompetensi melalui Revisi Kanwil. 2. Anggaran perlu direvisi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pengajuan revisi dana dipercepat sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disusun.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi, hingga triwulan 3 ini capaian masih 0, dan capaian akan terlihat di triwulan 4, sumber untuk memperoleh capaian IKP 1.1 adalah menggunakan data dari PDDIKTI. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 1.1 ini yaitu: 1. Program Sertifikasi Kompetensi (Sertikom), hingga triwulan 3 sudah disalurkan bantuan untuk 8.480 mahasiswa sebesar Rp5.586.750.000,- dengan rincian, pencairan Tahap I (80%) sebesar Rp4.590.380.000,- dan pencairan Tahap II (20%) sebesar Rp996.370.000,- yang akan dicairkan bulan Oktober. Program sertikom hingga 27 September 2022 sedang dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara daring. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), hingga triwulan 3 sudah disalurkan bantuan untuk 700 mahasiswa sebesar Rp3.250.000.000,- dengan rincian, pencairan Tahap I (80%) sebesar Rp1.640.440.000,- dan pencairan 100% Batch II untuk 410 mahasiswa sebesar Rp1.027.850.000,-. Kemudian pencairan Tahap II (20%) Batch I sebesar Rp575.710.000 akan dicairkan bulan Oktober Progres P2MD hingga 27 September 2022 sedang dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara daring. 3. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), hingga triwulan 3 sudah disalurkan bantuan untuk 1.208 mahasiswa sebesar Rp1.286.280.340,- dengan rincian, pencairan Tahap I (80%) sebesar Rp1.286.280.340,- dan pencairan Tahap II (20%) sebesar Rp526.569.660,- yang akan dicairkan bulan Oktober. Progres PKM hingga 27 September 2022 telah selesai dilaksanakan monitoring, dan hasil monitoring tersebut akan dipaparkan pada bulan Oktober. 4. Program Matching Fund, pada triwulan 3 telah dilakukan 3 tahapan pencairan dana untuk 106 perguruan tinggi, dengan rincian, tahap 1 diberikan kepada 46 perguruan tinggi sebesar Rp1.131.988.300,-, tahap 2 diberikan kepada 35 perguruan tinggi sebesar Rp1.213.815.566.400,- dan tahap 3 diberikan kepada 25 perguruan tinggi sebesar Rp10.234.826.000,-. Sebelum dilakukan pencairan bantuan, ada tahapan verifikasi kelayakan dan penandatanganan kontrak. Kemudian saat program berjalan akan dilakukan penyusunan format laporan kemajuan dan laporan akhir, serta monitoring, selain itu dilakukan juga koordinasi untuk penugasan hilirisasi matching fund 2022. Hingga bulan Oktober telah dilaksanakan monitoring ke seluruh perguruan tinggi penerima bantuan matching fund, dan melaksanakan pengumpulan dan verifikasi laporan kemajuan.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Masih menunggu laporan kemajuan dari PT agar bisa mendistribusikan Banper Termin II dari beberapa perguruan tinggi yang terkendala dalam proses pengadaan peralatan. 2. Terdapat blokir AA senilai Rp2.699.950.000,- untuk program matching fund.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mempercepat Pencairan termin II untuk Sertikom, PKM, P2MD. 2. Pencairan dana tahap kedua (30%) untuk seluruh periode akan dilaksanakan pada minggu November 2022 pasca verifikasi laporan kemajuan yang disampaikan paling lambat 14 Okt 2022. 3. Beberapa PTN sudah bisa melaksanakan pengadaan dengan Produk TKDN yang ada di Indonesia.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi, hingga triwulan 4 telah tercapai peningkatan sebesar 11,44%, dengan menggunakan sumber data dari PDDIKTI. Formula perhitungan adalah membagi jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi dengan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi dikali 100%. Rinciannya adalah jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi pada tahun 2021 (berakhir di tahun 2022) adalah 903.894 orang, dan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi di tahun 2021 adalah 7.902.590 orang. Beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 1.1 ini yaitu: 1. Program Sertifikasi Kompetensi (Sertikom), hingga triwulan 4 sudah disalurkan bantuan untuk 8.480 orang mahasiswa sebesar Rp5.586.750.000,-. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), hingga triwulan 4 sudah disalurkan bantuan untuk 1.110 orang mahasiswa sebesar Rp3.250.000.000,-. 3. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), hingga triwulan 4 sudah disalurkan bantuan untuk 1.247 orang mahasiswa sebesar Rp1.286.280.340,-. 4. Matching Fund - Pencairan dana periode ketiga sebesar 70% telah dilaksanakan pada minggu kedua September 2022 Rekap Batch I (46 PT) Rp 24.474.269.000 dengan pembagian 70% (17.131.988.300) 30% (7.342.280.700) Rekap Batch II (35 PT) Rp 18.307.952.000 dengan pembagian 70% (12.815.566.400) 30% (5.492.385.600) Rekap Batch III (25 PT) Rp 14.621.180.000 dengan pembagian 70% (10.234.826.000) 30% (4.386.374.000).</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Dari 5 program kemahasiswaan yang terdapat di RKAKL Dit. APTV hanya 3 program yang dapat dilaksanakan yaitu program sertikom, program PKM, dan program P2MD, sedangkan 2 program lainnya yaitu PWMV dan fasilitas magang tidak bisa dilaksanakan karena sudah ada program flagship (MBKM). 2. Terbitnya aturan terkait TKDN pada pertengahan tahun 2022 turut memperlambat proses pengadaan barang, termasuk pada program matching fund. 3. Pendistribusian bantuan idealnya melalui realokasi ke Pagu DIPA penerima, namun waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut cukup lama sehingga dipilih mekanisme kontrak ke perguruan tinggi penerima, dan pengadaan untuk PT sakter dan BLU, melalui mekanisme bantuan pengadaan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Menghitung ulang unit cost yang dibutuhkan untuk tahun 2023, sehingga output yang dihasilkan sesuai perencanaan. 2. Mendorong satker untuk mengidentifikasi alat/bahan yang diperlukan untuk pengadaan, dan memprioritaskan TKDN atau PDN, jika akan melakukan produk impor, maka proses pengajuan ijin penggunaan barang impor ke eselon 1 dipercepat. 3. Melakukan proses seleksi lebih awal dan melakukan komunikasi dengan pihak DJA terkait kemungkinan proses pendistribusian bantuan MF melalui skema realokasi sehingga penerima memiliki cukup waktu untuk melaksanakan penelitian dan pengadaan.</p>
2	[SP 2] Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	39,18	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 39,18	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 42,54	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian lulusan SMK bekerja/berwirausaha dalam satu tahun memperoleh gaji/pendapatan minimal 1x UMP melalui implementasi program: 1) Penyelesaian pembahasan dan pengesahan juknis Banper SMK PK yang telah diterbitkan dalam bentuk Perdirjen, yaitu Perdirjen Nomor 04 Tahun 2022 tentang Juknis Banper SMK PK tahun 2022 kemudian persiapan dalam tahap selanjutnya. 2) Menyelesaikan Seleksi SMK PK (Pusat Keunggulan) serta melaksanakan bimbingan teknis terkait rencana pelaksanaan sesuai dengan time line yang direncanakan. 3) Sosialisasi pelaksanaan program link and match SMK dengan dunia kerja/DUDI melalui skema pemadanan dukungan pada SMK Pusat Keunggulan. Capaian IKP ini menggunakan Data Sakernas dari BPS yang dirilis pada Triwulan 4. Adapun metode perhitungannya adalah menghitung jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan yang bekerja/berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimal 1x UMP dibagi dengan jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan kemudian dikalikan 100%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala yang dihadapi: Verifikasi dan validasi terhadap dunia kerja/DUDI sebagai mitra yang akan ditetapkan menjadi pelaksana pemadanan dukungan SMK PK tidak dapat dilaksanakan melalui internal Direktorat SMK semata, tetapi melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan terhadap sukses SMK PK.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi untuk memuluskan program SMK PK yaitu dengan melibatkan tim profesional/praktisi industri dan juga kalangan akademisi untuk segera menyelesaikan kurasi kepada usulan dunia kerja/DUDI yang akan diberikan program skema pemadanan dukungan terhadap pada SMK PK.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimal 1x UMP, hingga triwulan 2 capaiannya masih 0. Untuk capaian pada IKP 2.1 ini baru bisa terlihat pada triwulan 4, sumber data yang digunakan adalah perhitungan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Terdapat beberapa program yang mendukung agar tercapainya target pada IKP 2.1 ini, yaitu: 1) Penetapan sekolah pelaksana program SMK PK (Pusat Keunggulan), dengan total 1.402 SMK untuk skema reguler dan 230 SMK untuk SPD (Skema Pemadanan Dukungan). Hingga triwulan 2 sebanyak 700 SMK PK sudah diberikan bimbingan teknis, dan sebanyak 100 SMK PK telah dilakukan penyaluran bantuan. 2) Mendorong percepatan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dengan memperbanyak pola pembelajaran magang di dunia kerja, kelas industri serta penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui teaching factory di sekolah. Tahapan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan dengan melibatkan BBPPMPV/BPPMPV dan Perguruan Tinggi. 3) Disamping itu, terdapat 6.804 SMK non PK yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui jalur mandiri, sesuai dengan SK BSKAP nomor: 044/HKR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023. Tahapan yang telah dilaksanakan Direktorat SMK dan BBPPMPV/BPPMPV adalah sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui webinar. 4. Melakukan pemetaan serta kajian melalui expert judgement untuk menentukan dan mengevaluasi kompetensi keahlian yang dianggap potensial untuk dilakukan pengembangan serta prioritas untuk diberikan intervensi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : SMK PK yang mendapatkan bantuan yang berasal dari sumber anggaran APBN dan BA BUN, harus menyiapkan dokumen administrasi yang berbeda sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat dokumen administrasi baik perencanaan maupun pertanggungjawaban.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mempercepat proses pemilihan dokumen administrasi dan perencanaan serta meningkatkan intensitas fasilitasi ke satuan pendidikan penerima bantuan SMK PK.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimal 1x UMP, hingga triwulan 3 capaiannya masih 0. Untuk capaian pada IKP 2.1 ini baru bisa terlihat pada triwulan 4, sumber data yang digunakan adalah perhitungan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Terdapat beberapa program yang mendukung agar tercapainya target pada IKP 2.1 ini, yaitu: 1) Sebanyak 1.402 SMK sudah ditetapkan sebagai pelaksana program Pusat Keunggulan, dimana 376 SMK merupakan SMK PK melalui Skema Pemadanan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. Sampai dengan TW 3 seluruh SMK penerima program Pusat Keunggulan telah diberikan bimbingan teknis, dan telah dilakukan penyaluran bantuan dari APBN untuk termin I sebesar 70%, sedangkan untuk termin II akan disalurkan setelah industri memberikan komitmen dukungan yang sepadan, direncanakan akan dilakukan pada bulan November. 2) Upaya percepatan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk 1.402 SMK PK, dengan memperbanyak pola pembelajaran magang di dunia kerja, kelas industri serta penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui teaching factory di sekolah. Tahapan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan dengan melibatkan BBPPMPV/BPPMPV dan Perguruan Tinggi. 3) Disamping itu, terdapat 6.804 SMK non PK yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui jalur mandiri, sesuai dengan SK BSKAP nomor: 044/HKR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023. Tahapan yang telah dilaksanakan Direktorat SMK dan BBPPMPV/BPPMPV adalah sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui webinar. 4. Melakukan pemetaan serta kajian melalui expert judgement untuk menentukan dan mengevaluasi kompetensi keahlian yang dianggap potensial untuk dilakukan pengembangan serta prioritas untuk diberikan intervensi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : SMK PK yang mendapatkan bantuan yang berasal dari sumber anggaran APBN dan BA BUN, harus menyiapkan dokumen administrasi yang berbeda sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat dokumen administrasi baik perencanaan maupun pertanggungjawaban.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mempercepat proses pemilihan dokumen administrasi dan perencanaan serta meningkatkan intensitas fasilitasi ke satuan pendidikan penerima bantuan SMK PK.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimal 1x UMP, hingga triwulan 4 capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 42,54%, dengan menggunakan sumber data dari perhitungan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) periode Agustus 2022 oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Beberapa program yang mendukung agar tercapainya target pada IKP 2.1 ini yaitu: 1. Pelaksanaan program Sertifikasi kepada 45.000 peserta didik SMK merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai dukungan dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi DUDI. Adanya pengakuan berstandar ini diharapkan mampu memberikan jaminan ketika lulusan SMK masuk ke dunia kerja sehingga gaji/pendapatan dapat disesuaikan dengan UMP yang berlaku. 2. Pengembangan 1.402 SMK untuk menjadi pelaksana program Pusat Keunggulan, dengan 376 sekolah adalah SMK PK melalui Skema Pemadanan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan SDM sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga lulusannya diharapkan langsung direkrut oleh mitra DUDI. 3. Pelaksanaan program SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan diberikan kepada 100 sekolah dalam rangka menyiapkan lulusan SMK agar dapat berwirausaha. Upaya ini merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan keterampilan lulusan SMK di dunia kerja. 4. Upaya percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk 1.402 SMK PK, dengan memperbanyak pola pembelajaran magang di dunia kerja, guru/instruktur tamu dari DUDI, kelas industri serta penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui teaching factory di sekolah. Tahapan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan dengan melibatkan BBPPMPV/BPPMPV dan Perguruan Tinggi. 5. Disamping itu, terdapat 6.804 SMK non PK yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui jalur mandiri, sesuai dengan SK BSKAP nomor: 044/HKR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023. Tahapan yang telah dilaksanakan Direktorat SMK dan BBPPMPV/BPPMPV adalah sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui webinar. 6. Pemetaan dan pengembangan melalui kajian dengan melibatkan expert serta DUDI untuk menentukan dan mengevaluasi kompetensi keahlian yang dianggap potensial untuk dilakukan pengembangan serta prioritas untuk diberikan intervensi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Belum semua SMK mempunyai LSP P1, sehingga pelaksanaan sertifikasi berpotensi tidak bisa diikuti seluruh siswa SMK, sementara untuk mengikuti sertifikasi di LSP P2/P3 biayanya tidak terjangkau. 2. SMK berpotensi mendapat program Pusat Keunggulan ternyata sudah mendapatkan dana dari DAK, sehingga tidak bisa mendaftar sebagai SMK PK. 3. Sosialisasi kurikulum yang dilaksanakan berbasis IT atau digital belum terbiasa diterima oleh satuan pendidikan, sehingga implementasinya belum optimal. 4. Implementasi kurikulum merdeka pada satpen SMK belum sepenuhnya siap, sehingga perlu dorongan dan pembinaan dari pemerintah daerah agar dalam implementasinya dapat lebih optimal. 5. Hasil pemetaan di masing-masing wilayah berbeda-beda, karena kebutuhan tenaga kerja setingkat SMK berbeda-beda sehingga konsentrasi keahlian di daerah tertentu masih diperlukan sementara di daerah lain seperti di Pulau Jawa sudah jenuh.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mendorong pemda provinsi untuk memfasilitasi pendirian LSP P1 pada SMK binannya. 2. Melakukan sosialisasi kepada pemda provinsi agar SMK yang diunggulkan menjadi SMK PK tidak diberi alokasi anggaran DAK. 3. Melaksanakan sosialisasi kurikulum secara blended (daring dan luring) untuk selanjutnya dipantau hasilnya pada platform merdeka mengajar. 4. Mensosialisasikan kepada pemda bahwa implementasi kurikulum merdeka tidak wajib, dipersilahkan bagi satuan pendidikan yang benar-benar siap melaksanakan IKM secara mandiri. 5. Penetapan konsentrasi keahlian potensial berdasarkan rekomendasi dari konsorsium vokasi (terdiri dari asosiasi industri yang bergabung dalam konsorsium).</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



5	[SP 2] Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	50	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 10</p> <p>TW4 : 50</p>	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 17.03</p> <p>TW4 : 45.98</p>	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Proses pencapaian target satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan dunia kerja yang telah dilaksanakan yaitu: 1) Melakukan TOT Perencanaan berbasis data kepada calon petugas yang akan melakukan pendampingan ke lembaga pendidikan. 2) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penetapan sekolah mana saja yang akan dilakukan pendampingan. 3) Sosialisasi pada satuan pendidikan dilakukan pada bulan Mei secara daring. Aktivitas dukungan oleh Kemitraan dan Penyelaras DUDI: 1. Pembahasan program pengutan dan penyalarsan kurikulum pendidikan vokasi melalui pengembangan skema sertifikasi KKN bidang kontruksi dan Pariwisata. 2. FGD Pemetaan Potensi Kemitraan antara Ditjen Pendidikan Nasional dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. 3. Pendampingan reviu rencana bisnis SMK PK Skema Pemadanan Dukungan sebagai dasar pendanaan Perjanjian Kerjasama Capaian IKP ini adalah menghitung satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan satuan pendidikan vokasi dan dikalikan 100%</p> <p>Kendala / Permasalahan : Hambatan dalam pencapaian target yaitu: 1) Petunjuk teknis baru terealisasi di akhir bulan maret sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. 2) Sistem/aplikasi yang akan digunakan dalam pendampingan belum selesai 100%. Sedangkan hambatan yang ditemui dalam aktivitas Kemitraan dan Penyelaras dengan DUDI yaitu: 1) Keterlibatan peran DUDI, Kementerian dan lembaga dalam berkontribusi aktif terhadap program penyelarasan masih belum optimal. 2) Belum adanya database industri. 3) Panjangnya proses persetujuan dokumen kerja sama di internal 4). Proses yang panjang dari SMK PK Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD) serta Pemahaman yang kurang dari SMK dan Industri terkait SMK PK SPD.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dipersiapkan antara lain: 1) Mempercepat pelaksanaan sistem dan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan agar berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2) Membuat penjadwalan untuk melakukan pendampingan dan berusaha melaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian Strategi dalam hal Kemitraan dan Penyelaras dengan DUDI yaitu: 1) Berkoordinasi dengan sub bidang kemitraan serta kementerian/lembaga/Perguruan tinggi terkait untuk memberikan long list industri yang potensial untuk dijadikan sebagai key partner dalam melaksanakan penyelarasan. 2) Berkoordinasi untuk membuat sistem kerja sama di internal yang terintegrasi dengan setditjen. 3) Pendampingan ke industri dan SMK dalam pembuatan rencana bisnis untuk selanjutnya menjadi Perjanjian Kerjasama antara industri/dunia kerja dengan SMK.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja, hingga triwulan 2 untuk capaiannya masih 0, program-program yang dilaksanakan masih banyak dalam tahap sosialisasi dan pelaksanaan. Kemungkinan capaian baru akan terlihat di triwulan 3, yang menggunakan data dari dapodik, tracer study dan laporan internal. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 2.4 ini. Program-program yang dilaksanakan dan diampu oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelaras DUDI: 1. Pengajian kerja sama atas inisiasi dari industri, dengan total 158 pengajian. Ruang lingkup kerjasama mayoritas meliputi implementasi 8+1 link and match (pengembangan SDM, pelatihan, magang, dll). 2. Audiensi dengan IDUKA untuk membahas kerjasama yang akan dilakukan. 3. Penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan industri sebanyak 140 kesepakatan antara SMK PK dengan industri, dan 15 kesepakatan antara Dit.Mitras DUDI dengan industri. Kemudian ada 3 pengajian kerjasama dari industri akan ditandatangani pada TW III (Agustus 2022), antara lain: kerjasama dengan Morowali, United Tractor, dan Better Work Indonesia. 5. Pendampingan penyusunan rencana kerja untuk semua kerjasama yang telah ditandatangani. 6. Audiensi dengan industri di Kawasan Industri Kendal (KIK) dilantu oleh pengelola kawasan industri yang rencananya penandatanganan kerjasama akan dilakukan di bulan Agustus 2022. 7. Iktu terlibat dalam mempromosikan, menyeleksi, dan melakukan kurasi program SMK PK. 8. Melakukan pendampingan super tax deduction kepada industri. 9. Direncanakan untuk sisa anggaran yang tersedia akan digunakan untuk melaksanakan program akselerator daerah di beberapa lokasi pada triwulan III dan IV. Program-program yang dilaksanakan dan diampu oleh BBPPMPV/BPPMPV: 1. Pada BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri (BMTI), telah dilakukan sosialisasi dengan industri sebanyak 2 industri dengan target 11 kesepakatan, dan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama direncanakan akan dilakukan bersama dengan sosialisasi program upskilling dan reskilling. Direncanakan akan ada 21 kesepakatan telah ditandatangani di bulan Agustus. Penjaminan mutu telah dilakukan pendampingan secara daring ke sebanyak 1.010 SMK dari target 522 SMK, dan direncanakan akan dilakukan pendampingan secara luring di triwulan 3. 2. Pada BBPPMPV Bidang Pertanian, telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data ke SMK (daring) tanggal 2-9 Juni 2022, kepada sejumlah 544 SMK yang tersebar pada 4 Provinsi, yaitu Prov. Kepulauan Riau (53 SMK), Prov. Banten (404 SMK), Prov. Bangka Belitung (57 SMK), dan Prov. Papua (30 SMK), melibatkan 21 Widyaiswara. Raker Penyusunan Kebutuhan Dunia Kerja pada tanggal 29 Juni - 1 Juli 2022, menghasilkan 5 kesepakatan kerjasama antara BBPPMPV Pertanian dengan IDUKA, dan kegiatan pendamping lainnya yaitu Gelar pembelajaran berbasis project SMK, IDUKA dan Dinas Provinsi pada tanggal 22-24 Juni 2022. Selain itu BBPPMPV Bidang Pertanian sedang melakukan persiapan pengembangan Teaching Factory dan Workshop Teaching Factory, saat ini untuk panduan, penulisan dan penilaian telah selesai dilakukan, dan di bulan Juli ini akan dilakukan implementasi. 3. Pada BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika (BOE), ditriwulan 2 ini masih belum ada kegiatan yang dapat terlaksana. Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data yang dilakukan kepada seluruh SMK di Wilayah Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara akan dijadwalkan pada triwulan 3. Untuk pengembangan model masih dalam tahap perencanaan dan akan dilaksanakan di bulan Juli 2022. 4. Pada BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata (Bispar), di triwulan 2 ini telah dilakukan IHT bagi fasilitator bisnis dan pariwisata, kegiatan bimtek bagi LMS, sosialisasi PIP ke SMK binaan di 6 provinsi di Kalimantan dan DKI Jakarta, dan pelatihan moda daring bagi 134 SMK PK dengan total 1399 orang. 5. Pada BBPPMPV Bidang Seni dan Budaya, di triwulan 2 ini telah dilakukan sosialisasi pelatihan kompetensi dosen yang dilaksanakan tanggal 20-22 April 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 16 org mewakili dari 16 PT Vokasi yang membuka program studi seni dan budaya, IHT Fasilitator Penjaminan Mutu melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang dilaksanakan tanggal 20-22 April 2022 dan diikuti oleh 81 orang yang terdiri dari Widyaiswara, PTP, dan Pelaksana di lingkungan BBPPMPV Seni dan Budaya, dan sosialisasi Penjaminan Mutu melalui PBD (secara Daring) kepada: a). Dinas Pendidikan, dengan jumlah peserta 202 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kabid SMK, Kabidikmen/Kacobid, Kasi layanan pendidikan/Kasi SMK, seluruh Pengawas SMK, dan Pengolah Data/Admin ARKAS/Operator yang dilaksanakan tanggal 26 April 2022. (b). Satuan Pendidikan, dengan jumlah peserta 7.672 orang (DIY: 856 orang, Jateng: 6.124 orang, Bali: 692 orang) yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Kepala Tim Penjaminan Mutu, Bendahara BOS, dan Operator ARKAS yang dilaksanakan 27 April 2022. 6. Pada BBPPMPV Bidang Pengembangan Teaching Factory di BBPPMPV Bidang Pertanian sedang melakukan teaching factory di BBPPMPV Bidang Pertanian dengan Triwulan 3, sehingga pada bulan pekan 1 dan 2 Juli 2022 akan dilaksanakan magang pengelola Tefa, sambil menunggu Pedoman Pengembangan Teaching Factory diterbitkan Ditjen Diksi. 5. Ada 2 kesepakatan yang belum bisa dilakukan karena pihak industri belum bisa menghadiri pertemuan. 6. Sumber Daya BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika tersebar dalam kegiatan Pelatihan Komite Pembelajaran yang harus selesai pada Bulan Juni 2022 serta Pelatihan Kompetensi Guru Kejuruan baik yang daring maupun luring sehingga menyebabkan kegiatan ini harus terjdwalkan pada bulan Juli 2022. 7. Terkendala jaringan internet di pedalaman Kalimantan, dan fasilitator Bispar Terbatas. 8. Alokasi Anggaran, pada DIPA Awal alokasinya untuk 837 Orang namun implementasinya ada 134 SMK PK dengan jumlah sasaran 938 Orang. 9. Data Perguruan Tinggi Vokasi masih sedikit sehingga menyulitkan ketika menghubungi. 10. Jumlah guru kejuruan di beberapa kompetensi keahlian hanya sedikit sehingga kuota pendaftaran diklat vokasi belum bisa maksimal. 11. Banyak SMK PK yang belum menyelesaikan pendaftaran untuk Pelatihan Komite Pembelajaran dan banyak juga yang belum mendapatkan informasi. 12. Kehadiran peserta sosialisasi tidak sesuai dengan jumlah yang diundang. 13. Peserta sosialisasi belum mengenal tentang pentingnya PBD untuk kemajuan sekolah. Ketika TOT belum dapat menggunakan Raport Pendidikan yang otentik. 14. Pada kegiatan sosialisasi jumlah yang diundang tidak sesuai dengan yang hadir jadi kehadiran dirata-ratakan hanya 65%.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pembuatan sistem kemitraan berbasis digital sebagai sarana usulan pembentukan kemitraan baru yang bersifat kolaboratif antara berbagai pihak, yakni Dit. Mitras DUDI, Industri, BKHM, Biro Hukum, Setditjendiksi. 2. Setelah juknis terbit, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 3. Adanya penyampaian informasi terkait mekanisme pengelolaan akun kepada kepala sekolah baru atau satuan pendidikan yg mengalami kendala. 4. Melaksanakan magang kepada pengelola Tefa di IDUKA dan mengimplementasikan pengembangan Teaching Factory sesuai dengan pedoman kegiatan. 5. Akan dilakukan tindak lanjut bersama 2 industri yang terhambat dalam menyelesaikan kesepakatan. 6. Melakukan pendampingan dengan memperhatikan Sumber Daya BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika setelah kegiatan yang harus dilaksanakan lebih dulu. Sehingga kegiatan sosialisasi PBD dilaksanakan pada triwulan 3. 7. Berkoordinasi dengan disdikpro, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke SMK di wilayahnya. 8. Berkoordinasi dengan ditr GTK untuk penambahan Fasilitator dari GTK untuk mengajar. 9. Melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pendampingan secara luring dan daring. 10. Berkoordinasi dengan ditr SMK untuk penambahan Fasilitator dari ditr SMK untuk mengajar. 11. Kuota yang ada digunakan untuk kompetensi keahlian yang jumlah peminatnya banyak agar sasaran tercapai. 12. Melakukan pendataan SMK mana yang belum mendaftar, kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Sekolah. 13. Tindak lanjutnya kepada peserta TOT diminta dilakukan simulasi lanjutan setelah rapor pendidikan ontek dit dapat di proses, dan tim inti dari PBD BBL melakukan Simulasi setelah keluarnya rapor pendidikan yg sebenarnya. 14. Untuk sosialisasi satuan pendidikan akan dilakukan pendampingan ke sekolah secara luring dan daring.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja, hingga triwulan 3 untuk capaiannya sebesar 17,03%. Hasil capaian ini didapat dari data dapodik, tracer study dan laporan internal dengan format penghitungan jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas, mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi, dan memiliki kerjasama dengan dunia kerja dibagi dengan jumlah satuan pendidikan vokasi. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 2.4 ini. Program-program yang dilaksanakan dan diampu oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelaras DUDI: 1. Penandatanganan 25 kesepakatan dengan memperhatikan Sumber Daya BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika setelah kegiatan yang harus dilaksanakan lebih dulu. Sehingga kegiatan sosialisasi PBD dilaksanakan pada triwulan 3. 7. Berkoordinasi dengan disdikpro, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke SMK di wilayahnya. 8. Berkoordinasi dengan ditr GTK untuk penambahan Fasilitator dari GTK untuk mengajar. 9. Melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pendampingan secara luring dan daring. 10. Berkoordinasi dengan ditr SMK untuk penambahan Fasilitator dari ditr SMK untuk mengajar. 11. Kuota yang ada digunakan untuk kompetensi keahlian yang jumlah peminatnya banyak agar sasaran tercapai. 12. Melakukan pendataan SMK mana yang belum mendaftar, kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Sekolah. 13. Tindak lanjutnya kepada peserta TOT diminta dilakukan simulasi lanjutan setelah rapor pendidikan ontek dit dapat di proses, dan tim inti dari PBD BBL melakukan Simulasi setelah keluarnya rapor pendidikan yg sebenarnya. 14. Untuk sosialisasi satuan pendidikan akan dilakukan pendampingan ke sekolah secara luring dan daring.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja, hingga triwulan 4 untuk capaiannya adalah sebesar 45,98%. Hasil capaian ini didapat dari data dapodik, tracer study dan laporan internal dengan format penghitungan jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas, jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi, dan jumlah satuan pendidikan yang memiliki kerjasama dengan dunia kerja dibagi dengan jumlah satuan pendidikan vokasi. Perhitungan yang dilakukan langsung kepada satuan pendidikan vokasi, dengan rincian SMK sebanyak 14.199, PTV sebanyak 4.268, dan LKP sebanyak 11.252, dengan total satuan pendidikan vokasi sebanyak 27.585. Beberapa program yang diampu oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelaras DUDI yang mendukung capaian IKP 2.4, sebagai berikut: 1. Penandatanganan 64 kesepakatan dari SMK PK Skema Pemadanan Dukungan (SPD). 2. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan yaitu: - Pendampingan pelaksanaan SMK PK SPD - Penyelenggaraan JMFV Mahakarya Vokasi Adibusana pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2022 dengan melibatkan SMK bidang tata busana - Pelaksanaan kegiatan Cybersecurity Hackathon 2022 yang merupakan rangkaian acara penutupan program Mastercard Cardiac 2020 tahun 2022 bersama InfraDigital Foundation - Penyelenggaraan Webinar "Siap Berkarir Bersama Asuransi Sinar Mas" - Penyelenggaraan Webinar Perempuan Bijak Berusaha.id bersama Kumpul dan Microsoft - Pelaksanaan Rapat Persiapan Collaborative Framework on TVET Reformation in Encouraging Innovation Trough Public Private Partnership - Pembahasan Pembaruan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pendidikan Vokasi dan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) - Pembahasan tindak lanjut PKS antara Ditjen Pendidikan Vokasi dan PT Kawasan Industri Kendal dalam pemenuhan kebutuhan SDM di Industri-Industri di Kawasan Industri Kendal - Pelaksanaan dan Penyesuaian laporan Survey Kinerja Kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi dengan DUDI 3. Untuk penyelarasn khususnya tracer study SMK: pada TW 4 dilaksanakan pengumpulan data lewat Platform Tracer Study mulai tanggal 5 September 2022 hingga 26 November 2022 (cut off). Hingga akhir Desember data yang terinput di aplikasi tracer study sebagai berikut: a. Data Alumni: 529.756 orang atau 32,66% dari 1.622.209 orang alumni SMK tahun 2021 b. Data satuan pendidikan: 9.161 SMK atau 66,68% dari 13.738 SMK c. Data DUDI 5.301 mitra d. Berdasarkan frame sampel yang di tetapkan menggunakan kaidah statistik, capaian sampel yang mengisi instrumen adalah 48,07% untuk alumni SMK dan 89% untuk satuan pendidikan SMK 4. Melakukan penyusunan laporan tracer study untuk memenuhi kebutuhan data rapor pendidikan, platform tracer study tetap dibuka untuk pengumpulan data sampai dengan 30 Maret 2023. Beberapa program yang diampu oleh BBPPMPV/BPPMPV yang mendukung capaian IKP 2.4, sebagai berikut: 1. Pada BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika di triwulan 4 telah dilakukan upskilling dan reskilling guru kejuruan dari anggaran BABUN angkatan 1 diikuti oleh 60 orang terbagi dalam 4 kelas, angkatan 2 diikuti oleh 60 orang dibagi dalam 4 kelas, SMK PK Industri diikuti oleh 45 orang dibagi dalam 3 kelas, Manajerial Kepala SMK CEO (Biogrend Unibraw) diikuti oleh 60 orang dilakukan dengan sistem Backgrant bekerjasama dengan Universitas Brailwaya Malang, angkatan IV diikuti oleh 60 orang dibagi dalam 4 kelas, upskilling dan reskilling dosen Angkatan II diikuti oleh 8 orang, instruktur LKP angkatan II diikuti oleh 10 orang, Pelatihan Metodologi Pengajaran Kejuruan diikuti oleh 30 orang, Pelatihan Manajemen Bengkel bagi Teknis Bengkel/Laboratorium SMK diikuti oleh 30 orang, Pengembangan model pembelajaran untuk SMK dengan judul "konversi Mobil Listrik sebanyak 12 orang peserta. 2. Pada BBPPMPV Pertanian di triwulan 4 telah dilakukan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah SMK, diikuti 40 peserta dan tahap 2 diikuti oleh 60 orang, Pembekalan Bagi Calon Pekerja Migran Musiman Bidang Pertanian yang mengikuti adalah 434 orang, Diklat Guru Produktif diikuti oleh 20 orang, Formulas Modul Diklat dan Pemagangan Kementan menghasilkan 50 modul. Pendampingan PIP jumlah sasaran 76 SMK. Pendampingan/Pelatihan Tracer Study Secara Daring dengan total 405 SMK (Prov Banten: 10-11 Okt, 290 SMK; Prov. Papua: 12 Okt, 21 SMK; Prov. Babel: 12 Okt, 46 SMK; dan Prov. Riau: 13 Okt, 48 SMK). Pendampingan PBD ke Dinas Pendidikan 4 Provinsi, monitoring dan evaluasi Perencanaan Berbasis Data telah terlaksana pada 46 lokasi (34 lokasi Tahap 1 dan 12 lokasi ditahap 2). Implementasi Pengembangan Teaching Factory dan pendampingan industri antara lain: Tonas Coffee, Estby Bajery, CV Sheva Fish dan Tazakka Elektronik Teknologi. 3. Pada BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri di triwulan 4 telah dilakukan peningkatan kompetensi bagi instruktur tambahan anggaran BA-BUN diikuti oleh 12 orang peserta, dosen tambahan anggaran tambahan BA-BUN diikuti oleh 15 orang peserta, dan tahap 2 diikuti 12 orang peserta, guru produktif diikuti oleh 87 peserta bekerjasama dengan Dinas Prov. Banten. Perencanaan Berbasis Data, sudah selesai dilaksanakan pada TW II secara daring dari target sasaran 522 SMK di wilayah Prov. Jabar, Lampung dan Bengkulu dan diikuti oleh 1.010 SMK. Model pembelajaran Project Based Learning melalui pelatihan IPAS diikuti oleh 12 orang sejumlah 2 model. 4. Pada BBPPMPV Kelautan, Perikanan, Teknologi Industri dan Komunikasi di triwulan 4 telah dilakukan peningkatan kompetensi dosen sebanyak 2 kelas diikuti 39 orang, Instruktur LKP sebanyak 2 kelas diikuti sebanyak 38 orang. Monitoring dan evaluasi perencanaan berbasis data pada 108 SMK di wilayah binaan BBPPMPV KPTK. 5. Pada BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik di triwulan 4 telah dilakukan upskilling dan reskilling guru kejuruan yang diikuti 35 orang, dosen angkatan 1 jumlah peserta 29 orang, angkatan 2 jumlah peserta 38 orang, Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan jumlah peserta 81 orang. Komitmen bersama antara DUDI dan BBPPMPV BBL sebanyak 27 Komitmen Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama sebanyak 19 Perjanjian Kerjasama dengan DUDI serta 12 PKS dengan Instansi. 6. Pada BBPPMPV Seni dan Budaya di triwulan 4 telah dilakukan pelatihan bagi Guru SMK sejumlah 193 Guru SMK, peningkatan kompetensi dosen vokasi (BA-BUN) peserta sejumlah 24 orang, guru produktif (BA-BUN) peserta sejumlah 221 orang. Sosialisasi Tracer Study peserta sejumlah 3.939 orang dari 1.933 SMK (daring) dan 330 orang (luring) berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Bali. 7. Pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata di triwulan 4 telah dilakukan Pendampingan Implementasi Pembelajaran (PIP) terhadap SMK di 6 Wilayah BBPPMPV Bispar yakni Prov. DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara ke 938 orang dari 134 SMK PK. Upskilling reskilling hasil efisiensi dana BABUN dioptimalisasi sebanyak 12 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Belum terbnyta nota kesepahaman yang sudah diperbaharu sehingga menyebabkan mundurnya penandatanganan PKS antara Ditjen Pendidikan Vokasi dan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). 2. Untuk survey kinerja kemitraan satuan diksi dengan DUDI, terkendala dengan rendahnya partisipasi DUDI mitra satuan pendidikan vokasi untuk menyelesaikan pengisian survei pengukuran kinerja kemitraan, sehingga pengisian data kurang maksimal. 3. Untuk tracer study terkendala dengan perubahan metadata rapor pendidikan yang sangat dinamis, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antara pengelola Data, Dit. Mitras DUDI dan Tim Walidata di Rapor Pendidikan. 4. Peserta diklat Upskilling dan Reskilling untuk guru beberapa ada yang tiba-tiba mengundurkan diri pada saat pelatihan akan dimulai. 5. Peserta Diklat Upskilling dan Reskilling untuk Instruktur LKP hanya terfokus pada 1 bidang keahlian, karena informasi ketersediaan data rumpun keahlian belum lengkap. 6. Terdapat Satuan Pendidikan yang melakukan penginputan data pada rapor pendidikan tidak sesuai dengan di kondisi riil di satuan pendidikannya, sehingga perlu dilakukan pembinaan ulang pada saat monitoring.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan BKHM untuk mempercepat pembaharuan nota kesepahaman Ditjen Pendidikan Vokasi dan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). 2. Melakukan koordinasi dan pendekatan dengan DUDI untuk dapat mengisi survey kinerja kemitraan tersebut 3. Pada kegiatan tracer study dilakukan Koordinasi dengan tim pengolah data melalui daring serta rapor pendidikan Ditjen vokasi setiap hari Rabu sore. 4. Pemanggilan peserta maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga calon peserta dapat lebih mempersiapkan diri dan mengurangi resiko peserta mengundurkan diri. Lebih banyak database untuk LKP sehingga judul diklat yang dilaksanakan lebih bervariasi.</p>
---	--	---	---	----	---	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



Balai Sertifikasi Elektronik

6	[SP 3] Meningkatkan riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2506	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 750 TW4 : 2506	TW1 : 0 TW2 : 875 TW3 : 1864 TW4 : 4573	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Progress program keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat yaitu: Program PPM (Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) sudah sampai tahap pengumpulan proposal, dan bersiap untuk secepatnya melaksanakan seleksi dan penentuan proposal PPM yang disetujui. Capaian IKP ini diperoleh dengan cara menghitung Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala yang dihadapi antara lain: 1) Banyaknya proposal yang masuk dari PT Vokasi, sehingga membutuhkan waktu untuk proses seleksi agar mendapatkan semangat program PPM agar hasilnya mampu dihilirkan baik inovasi dan karya ilmiah dari PT Vokasi kepada masyarakat, 2) Sebagian anggaran PPM masih diblokir sehingga pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu proses seleksi terhambat dan penetapan pemenang.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi dan tindak lanjut yang telah dipersiapkan antara lain: 1) Mempercepat dan menambah jumlah tim reviewer proposal PPM, 2) Melengkapi dokumen dan data dukung untuk pengajuan buka blokir anggaran</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat, hingga triwulan 2 sudah ada capaian yaitu sebanyak 875 karya. Data ini didapat dari aplikasi Dashboard Ditjen Pendidikan Vokasi dan PD Dikti. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 3.1 ini, yaitu : 1. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), telah dilaksanakan penandatanganan kontrak PPM oleh pimpinan PT(LDikti/PLUPPM/LPPM atau yang mewakili pada tanggal 22 Juni 2022. Total bantuan yang sudah diberikan kepada Perguruan Tinggi sebesar Rp 27.120.101.400,- (merupakan 70% dari nilai kontrak) , dan sisanya sebanyak 30% akan diberikan apabila pihak Perguruan Tinggi telah menyampaikan Laporan Progress. 2. Keayaan Intelektual (KI), hingga triwulan 2 telah dilakukan penyusunan juknis insentif KI dan artikel ilmiah, dan penyusunan panduan insentif KI dan artikel ilmiah dimana telah sampai ke tahap finalisasi juknis dan panduan, pembuatan TOR untuk 3 bimtek, yaitu bimtek pendirian sentra KI, drafting paten, dan penulisan artikel ilmiah. Selain itu pun telah dilakukan persiapan untuk bimtek Pembuatan Sentra Keayaan Intelektual di Politeknik Negeri, Penyusunan Draft Usulan Paten, dan Penyusunan Draft Usulan Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi, yang direncanakan akan dilaksanakan di triwulan ke 3. 3. Program Matching Fund (MF), hingga triwulan 2 telah dilakukan evaluasi substansi dimana sudah menghasilkan 102 produk/pengusul atau 68,57%. Terkait dengan dana, untuk dana rekomendasi sudah menyerpag pagu yang tersedia di batch 1. Untuk hasil uji kelayakan proposal yang sudah lolos senilai Rp 21.000.000.000,- dalam hal ini masih ada kurasi dari reviewer yang akan menambahkan jumlah penerima bantuan apabila memang dianggap layak.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pada program PPM, KI, dan MF masih terdapat nomor rekening perguruan tinggi berbeda antara yang diterima dan yang ditulis di Aplikasi Omspan, menjadikan retur dari KPPN.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Menyelesaikan retur di KPPN dengan surat pengantar dari Direktorat APTV. 2. Melakukan akselerasi untuk pembukaan blokir. 3. Melakukan pendataan kepada peneliti yang telah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal ternama seperti scops. 4. Mencari solusi pengadaan alat menggunakan ijin menteri, dan mencari barang-barang mana saja yang masih menggunakan TKDN.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat, hingga triwulan 3 sudah ada capaian yaitu sebanyak 989 karya. Data ini didapat dari aplikasi Dashboard Ditjen Pendidikan Vokasi dan PD Dikti. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 3.1 ini, yaitu : 1. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), telah diterbitkan sebanyak 975 judul. hingga saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak dan pencairan dana kegiatan penelitian lanjutan gelombang 2 serta penugasan pengembangan aplikasi Bima ke perguruan tinggi. Pada bulan Oktober sedang dilakukan monitoring, pemerimaan proposal dan bimtek penulisan proposal program PPM tahun 2023. Pada bulan November akan dilaksanakan evaluasi administrasi proposal baru dan bimtek aplikasi Bima. 2. Keayaan Intelektual (KI), telah diterbitkan sebanyak 14 karya. Pada triwulan 3 telah dilaksanakan pengumuman dan pendaftaran, seleksi prosal, pengumuman dan penetapan, serta pemberian insentif untuk publikasi artikel dan paten. Selain itu, juga dilaksanakan pelaksanaan evaluasi proposal insentif paten dan bimtek artikel ilmiah. 3. Program Matching Fund, pada triwulan 3 telah dilakukan 3 tahapan pencairan dana untuk 106 perguruan tinggi. Adapun rinciannya adalah, tahap 1 diberikan kepada 46 perguruan tinggi sebesar Rp17.131.988.300,-, tahap 2 diberikan kepada 35 perguruan tinggi sebesar Rp12.815.566.400,-, dan tahap 3 diberikan kepada 25 perguruan tinggi sebesar Rp10.234.826.000,-. Sebelum dilakukan pencairan bantuan, dilakukan verifikasi kelayakan dan penandatanganan kontrak, kemudian saat program berjalan akan dilakukan penyusunan format laporan kemajuan, laporan akhir, dan monitoring. Selain itu dilakukan juga koordinasi untuk penugasan hilirisasi matching fund 2022. Hingga bulan Oktober telah dilaksanakan monitoring, pengumpulan, dan verifikasi laporan kemajuan pada seluruh perguruan tinggi penerima bantuan matching fund.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Masih menunggu laporan kemajuan dari perguruan tinggi agar bisa mendistribusikan Banper Termini II dari beberapa perguruan tinggi yang terkendala dalam proses pengadaan peralatan. 2. Terdapat blokir AA senilai Rp2.699.950.000,- untuk program matching fund. 3. Dana insentif KI sebagian masih terblokir Automatic Adjustment sehingga insentif KI belum bisa maksimal disalurkan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pencairan dana tahap kedua (30%) untuk seluruh periode akan dilaksanakan pada bulan November 2022 setelah verifikasi laporan kemajuan yang disampaikan paling lambat 14 Okt 2022. 2. Beberapa PTN melaksanakan pengadaan dengan Produk TKDN yang ada di Indonesia. 3. Melakukan akselerasi untuk pembukaan blokir, dan memberikan insentif Keayaan Intelektual di bulan Oktober 2022. 4. Melaksanakan evaluasi proposal insentif paten agar bisa dijadikan pembelajaran di tahun 2023.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat, di triwulan 4 capaian yaitu sebanyak 2709 karya, sehingga total keluaran penelitian di tahun 2022 adalah sebanyak 4573 karya. Data ini didapat dari aplikasi Dashboard Ditjen Pendidikan Vokasi dan PD Dikti. Beberapa program yang mendukung agar tercapainya target pada IKP 3.1 ini yaitu : 1. Matching Fund - Pencairan dana periode ketiga sebesar 70% telah dilaksanakan pada minggu kedua September 2022 Rekap Batch I (46 PT) Rp 24.474.269.000 dengan pembagian 70% (17.131.988.300) 30% (7.342.280.700) Rekap Batch II (35 PT) Rp 18.307.952.000 dengan pembagian 70% (12.815.566.400) 30% (5.492.385.600) Rekap Batch III (25 PT) Rp 14.621.180.000 dengan pembagian 70% (10.234.826.000) 30% (4.386.354.000). 2. Bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten periode 3 telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Oktober 2022 dan secara luring pada tanggal 12-14 Oktober 2022 dengan total peserta sebanyak 21 orang. 3. Penerima fasilitasi permohonan paten periode 3 telah ditetapkan melalui surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Nomor 40/D4/DAL.04.00/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Paten Periode 3. Dosen penerima dana tersebut sebanyak 14 orang dengan total dana sebesar Rp. 15.650.000,-. Dana tersebut seluruhnya telah disalurkan kepada penerima. 4. Penerima program insentif Keayaan Intelektual (KI) khususnya Paten, Paten Sederhana, dan Paten yang diimplementasikan di industri dan insentif artikel ilmiah internasional bereputasi telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Nomor 30/D4/DAL.04.00/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Insentif Keayaan Intelektual dan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi Tahap 2 Dosen Vokasi Tahun Anggaran 2022. Dosen Vokasi Penerima Insentif Paten, Paten Sederhana, Paten yang diimplementasikan di Industri, dan artikel ilmiah internasional bereputasi masing-masing sebanyak 18, 25, 4, dan 15 orang dengan total dana sebanyak Rp. 865.000.000,-. Dana tersebut seluruhnya telah disalurkan kepada penerima. 5. Bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten periode 4 untuk penerima dana penelitian skema Penelitian Produk Vokasi (P2V) dan Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi (P2VUT) telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 November 2022 dan secara luring pada tanggal 28-30 November 2022 dengan total peserta sebanyak 30 orang. 6. Total dana yang disalurkan oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi untuk program insentif keayaan intelektual dan artikel ilmiah internasional bereputasi sampai TW IV sebanyak Rp. 1.990.450.000,-. 7. Total Keayaan Intelektual yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi sampai TW IV sebanyak 133 KI, dan jumlah Keayaan Intelektual yang didanai oleh perguruan tinggi (mandiri) adalah sebanyak 2261 KI, data tersebut termasuk jumlah keayaan intelektual diluar Paten dan Paten Sederhana (sumber data SINTA). 8. Penerimaan laporan kemajuan dan Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) 70% untuk penerima bantuan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) seluruh skema (Oktober), Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PPM uti skema multitaahun (November), dan Pelaksanaan seminar hasil program PPM untuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah selesai (Desember). Pencairan sisa dana bantuan program PPM (tahap 2 sebesar 30%) senilai Rp. 11.613.521.100,- (November). Total jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dosen vokasi yang didanai dari Dit. APTV sampai TW IV adalah sebanyak 168 artikel, dan jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi yang didanai oleh perguruan tinggi (mandiri) adalah sebanyak 1136 artikel (sumber data SINTA).</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Masih terbatasnya luaran penelitian yg siap di publikasikan di jurnal internasional bereputasi atau didaftarkan untuk perlindungan paten. 2. Masih terbatasnya luaran penelitian yg siap di publikasikan di jurnal internasional bereputasi. 3. Banyak peneliti yang belum mengunggah luaran yang dijanjikan pada aplikasi BIMA.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen permohonan paten untuk meningkatkan kemampuan dosen vokasi mendapatkan perlindungan terhadap prooduk penelitian yang dihasilkan. 2. Melaksanakan workshop pembentukan Sentra KI untuk mendorong Institusi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi ikut aktif dalam memberikan program untuk meningkatkan produktivitas dosen vokasi menghasilkan karya ilmiah khususnya keayaan intelektual. 3. Melaksanakan bimbingan teknis penulisan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi guna meningkatkan kemampuan dosen vokasi dalam mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi. 4. Menyelenggarakan program insentif bagi dosen vokasi yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi, guna meningkatkan motivasi dosen vokasi untuk menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. 5. Koordinasi secara intens dengan Tim Pengembangan guna percepatan penyelesaian aplikasi BIMA.</p>
7	[SP 4] Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja, sampai dengan Triwulan I, Ditjen Pendidikan Vokasi telah melakukan beberapa hal diantaranya: 1) Penyusunan Perjanjian Kinerja melalui aplikasi Spasikita baik di level unit utama maupun satker yang disesuaikan dengan Renstra Revisi Kemendikbudristek. 2) Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja level unit utama dan level satker melalui aplikasi Spasikita untuk memudahkan identifikasi pencapaian kinerja. 3) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 level unit utama maupun level satker melalui aplikasi eplaning sebagai bahan perencanaan program dan anggaran di tahun yang akan datang. 4) Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala dengan seluruh satuan kerja Ditjen Pendidikan Vokasi. 5) Penyelesaian permasalahan terkait Definisi Operasional IKU Politeknik dan AKN, hal ini dikarenakan capaian kinerja pada tahun sebelumnya masih ada perbedaan persepsi antara Politeknik/AKN dalam memahami terhadap Definisi Operasional IKU. 6) Berkoordinasi dengan seluruh satker untuk melakukan pengukuran kinerja TW I, agar mendapatkan hasil pengukuran kinerja yang berkualitas dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 7) Melakukan persiapan untuk pendampingan kepada satker agar melakukan perbaikan-perbaikan SAKIP sesuai dengan rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya. 8) Melakukan revisi Renstra Unit Utama untuk disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022. Evaluasi SAKIP masih menunggu arahan dan sosialisasi dari Biro Perencanaan yang masih dalam tahap penyelesaian KKE dengan Permenpan-RB No 88 Tahun 2021. Setelah itu akan diadakan evaluasi mandiri dan dilanjutkan evaluasi dari Tim Evaluator. Merujuk tahun sebelumnya, Nilai SAKIP baru akan diumumkan pada TW 4.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dalam pelaksanaan SAKIP, sampai dengan TW I ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: 1) Revisi Renstra Kemendikbudristek yang memakan waktu agak lama, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi sehingga berdampak kepada pengukuran kinerja TW I juga mengalami kemunduran. 2) Perbedaan persepsi dan pemahaman antara Politeknik/AKN terkait Definisi Operasional IKU PTN 3) Belum disesuaikannya Renstra satuan kerja. Untuk Politeknik dan AKN masih banyak yang rensstranya belum mengacu kepada 8 IKU PTN. Untuk Balai dan Satker Pusat harus disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi dan Tindak Lanjut antara lain: 1) Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada semua satker untuk segera menyusun dan membuat Pengukuran Kinerja TW 1 sesuai ketentuan time line maupun jadwal yang ditentukan oleh Biro Perencanaan melalui aplikasi Spasikita dengan menekankan peningkatan kualitas pengukuran kinerja yaitu memperdalam analisa disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 2) Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada semua satker Politeknik/AKN dalam rangka penyamaan persepsi/pemahaman tentang Definisi Operasional IKU PTN, sehingga dalam melakukan pengukuran kinerja didapatkan data yang valid dan akurat sesuai dengan DO dan formula perhitungan yang ada pada Kepmen No. 3/M/2021. 3) Melakukan sosialisasi kepada seluruh satker agar segera melaksanakan revisi Renstra dan diselaraskan dengan Permendikbudristek No. 13 tahun 2022 (Untuk Satker Pusat dan Balai), dan Untuk Politeknik dan AKN agar disesuaikan dengan Kepmen No. 3/M/2021</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi, untuk capaiannya akan terlihat di triwulan 4 setelah lembar hasil evaluasi keluar. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 4.1 ini, yaitu : 1. Melakukan rapat pengukuran kinerja triwulan 2 dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang dikordinasikan oleh Sub Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, serta melakukan penyusunan dan penginputan pengukuran kinerja triwulan 2 ke aplikasi Spasikita. 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek terkait dengan evaluasi SAKIP yang saat ini ada pembaharuan terhadap Kertas Kerja Evaluasi (KKE), kepada semua satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. 3. Mengikuti sertifikasi pejabat/staf untuk mengikuti Dilat SAKIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek. 4. Menganalisis hasil evaluasi satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi untuk tahun 2021 untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan asistensi SAKIP kepada satker yang belum mendapatkan predikat SAKIP BB. 5. Melaksanakan asistensi SAKIP kepada satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. 6. Finalisasi renstra Ditjen Pendidikan Vokasi. 7. Melakukan rapat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE) tahun 2021.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Revisi Renstra Kemendikbudristek yang memakan waktu cukup lama, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi sehingga berdampak kepada pengukuran kinerja TW I juga mengalami kemunduran. 2. Proses penyusunan Renstra dan Definisi Operasional oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi bersama Satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami keterlambatan karena menyesuaikan dengan Renstra Kemendikbudristek. 3. Anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan asistensi SAKIP tidak dapat menjangkau seluruh Satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. 4. Terdapat pemburuan Kertas Kerja Evaluasi Penilaian SAKIP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, sehingga memerlukan perhatian lebih supaya tetap mampu meningkatkan predikat SAKIP.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mempercepat proses revisi Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan Renstra Kemendikbudristek. 2. Mempersiapkan dan membina Satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi bekerja sama dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek dengan tujuan meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, yaitu memperdalam analisa disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek untuk melaksanakan asistensi SAKIP dan memetakan potensi peningkatan predikat SAKIP dengan adanya Kertas Kerja Evaluasi yang baru berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. 4. Mempersiapkan dan membina Satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi supaya siap dalam melakukan evaluasi mandiri SAKIP yang dijadwalkan pada Bulan Juli 2022.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi, untuk capaiannya akan terlihat di triwulan 4 setelah lembar hasil evaluasi keluar. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 4.1 ini, yaitu : 1. Melakukan rapat pengukuran kinerja triwulan 3 dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang dikordinasikan oleh Sub Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, serta melakukan penyusunan dan penginputan pengukuran kinerja triwulan 3 ke aplikasi Spasikita. 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek terkait dengan evaluasi SAKIP, dimana saat ini ada pembaharuan terhadap Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3. Finalisasi revisi Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi dan Kemendikbudristek. 4. Melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Setidjen Pendidikan Tinggi, serta stakeholder terkait lainnya untuk untuk mengetahui capaian IKP Ditjen Pendidikan Vokasi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Terdapat pemburuan Kertas Kerja Evaluasi Penilaian SAKIP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, sehingga memerlukan ketelitian lebih dalam proses pengisiannya.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pelibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian penghargaan kepada pegawai atau tim kerja yang mendukung kinerja organisasi. 2. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara daring maupun luring.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi, pada lembar hasil evaluasi (LHE) yang telah di tandatangani di tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 83,75 dengan predikat A. Dilihat dari nilai SAKIP tahun 2021, Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami peningkatan sebesar 2,34 poin dimana nilai SAKIP pada tahun 2021 adalah 81,41. Beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 4.1 adalah : 1. Pembahasan dan konfirmasi atas hasil evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal. 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan pimpinan satker di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2022. 3. Mensosialisasikan penggunaan menu Lakin pada aplikasi Spasikita kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. 4. Melakukan pengukuran kinerja TW IV Ditjen Pendidikan Vokasi serta mendorong semua satker untuk melakukan pengukuran kinerja TW IV sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 5. Menyampaikan hasil analisa dan laporan hasil evaluasi AKIP kepada pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Pembahasan dan konfirmasi atas hasil evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal dilakukan secara daring dan secara bersamaan dengan seluruh Satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sehingga koordinasi kurang maksimal. 2. Proses pengisian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) memerlukan ketelitian karena terdapat pemburuan KKE Penilaian SAKIP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pertemuan bersama Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan, untuk berkoordinasi terkait evaluasi AKIP.</p>	

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

7	[SP 5] Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat Zi-WBK/WBBM	satker	16	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 16	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 10	TW1 : Progress / Kegiatan : Dalam rangka satuan kerja mendapatkan predikat ZiWBK/WBBM, pada triwulan I progres yang telah dilakukan antara lain: 1) Melakukan sosialisasi evaluasi dan penilaian pembangunan Zi-WBK/WBBM kepada satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zi menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. 2) Mengajukan calon satker yang akan diusulkan mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM kepada Tim Penilai Internal (TPI) Kemendikbudristek. 3) Melakukan perencanaan untuk pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kepada satker-satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZiWBK/WBBM. Untuk Tahun 2022, sebanyak 23 satker yang diusulkan dengan rician 19 Satker diusulkan mendapatkan predikat ZiWBK, dan 4 Satker diusulkan mendapatkan predikat WBBM). Adapun hasil penilaian diperkirakan baru akan selesai pada Triwulan 4. Kendala / Permasalahan : Kendala yang dihadapi: Pemahaman dan kesiapan yang tidak merata dan berbeda terhadap evaluasi dan penilaian pembangunan Zona Integritas dari masing-masing satker yang diusulkan. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan: Diperlukan pendampingan dan pembinaan lebih intens untuk masing-masing satker yang diusulkan terhadap persiapan yang dibutuhkan satker sebelum diverifikasi oleh TPI Kemendikbudristek. Melakukan duplikasi dari satker yang sudah berhasil mendapatkan predikat Zi WBK/WBBM. TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZiWBK/WBBM, untuk capaiannya akan terlihat di triwulan 4 menunggu Surat Keputusan dari Menteri PAN RB. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 5.1 ini, yaitu : 1. Tim RBI (Reformasi Birokrasi Internal) Ditjen Pendidikan Vokasi telah melakukan pendampingan kepada satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang diajukan mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM. 2. Satuan kerja yang diajukan sebanyak 23 satker, dan telah diajukan ke Tim Penilai Internal (TPI) Kemendikbudristek. 3. Dari 23 satker tersebut kemudian terpilih 6 satker dari Ditjen Pendidikan Vokasi yang masuk 30 besar satker di lingkungan Kemendikbudristek. 4. Selanjutnya TPI akan menseleksi 15 satker lagi yang akan diajukan ke Kementerian PAN RB. Kendala / Permasalahan : 1. Persiapan dan pemahaman satker terlihat masih kurang matang dalam mempersiapkan diri memasuki masa penilaian satker calon Zi-WBK/WBBM. 2. Pelaksanaan agenda pembangunan Zona Integritas waktunya terlalu dekat dengan masa penilaian, sehingga terkesan hanya formalitas memenuhi dokumen pendukung LKE. 3. Adanya aturan yang baru disosialisasikan dari Kementerian PANRB terkait kuota maksimal satker yang dapat diajukan KL menjadikan banyak satker tidak dapat melanjutkan penilaian satker Zi-WBK/WBBM (Pada tahun 2022 ditetapkan kuota pengusulan calon unit kerja berpredikat Zi WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebanyak 15 (lima belas) satuan kerja. Hal tersebut berdasarkan Surat Nomor 34682/A.A4/OT.01.03/2022 Tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Berpredikat Zi WBK/WBBM Tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021, SE MenPANRB Nomor 15 Tahun 2022, serta Surat Deputi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/PW.00/2022, tanggal 24 Mei 2022). Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan pendekatan dan pendampingan kepada Tim Zi satker yang diajukan dalam rangka mempersiapkan penilaian dari tim TPI. 2. Sebagai antisipasi diperlukan persiapan jangka panjang paling tidak setahun sebelumnya agar satker lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki masa penilaian pembangunan ZiWBK/WBBM. 3. Membuat skala prioritas Satker yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat ZiWBK/WBBM pada tahun berikutnya. TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZiWBK/WBBM, untuk capaiannya akan terlihat di triwulan 4 menunggu Surat Keputusan dari Menteri PAN RB. Terdapat beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 5.1 ini, yaitu : 1. Pendampingan 6 satker yang sudah lolos seleksi tahap 1 untuk dicalonkan menjadi satker predikat ZiWBK/WBBM. ke-6 satker ini merupakan bagian dari 30 satker di Kemendikbudristek yang akan dinilai oleh TPI (Tim Penilai Internal). 2. Pendampingan satker yang lolos menuju penilaian TPN (Tim Penilai Nasional/Kementerian PANRB). Dari 15 satker yang menjadi kuota satker Kemendikbudristek untuk diajukan Zi-WBK/WBBM terdapat 1 satker Ditjen Pendidikan Vokasi yang lolos yaitu BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri. 3. Persiapan lebih awal pembentukan Tim RB Ditjen Pendidikan Vokasi dan pengumpulan Lembar Kerja Evaluasi satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai seleksi dini satker yang berpotensi untuk diajukan Zi-WBK/WBBM. Kendala / Permasalahan : Pada pertengahan tahun 2022 ditetapkan kebijakan bahwa kuota pengusulan calon unit kerja berpredikat Zi WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya 15 (lima belas) satuan kerja. Hal tersebut sesuai dengan Surat Nomor 34682/A.A4/OT.01.03/2022 Tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Berpredikat Zi WBK/WBBM Tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021, SE MenPANRB Nomor 15 Tahun 2022, serta Surat Deputi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/PW.00/2022, tanggal 24 Mei 2022. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Perlu adanya dorongan secara terus-menerus dalam membangun Tim Kerja RB Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai modal peningkatan kualitas hasil PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) ataupun PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. 2. Melakukan internalisasi dan mengembangkan pola kerja yang menjamin setiap pegawai dapat melaksanakan 8 area perubahan menjadi budaya kerja di lingkungannya. TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKP 5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZiWBK/WBBM, untuk capaiannya hingga tahun 2022 ini adalah sebanyak 9 satker yang berpredikat WBK dan 1 satker yang berpredikat WBBM. Satker yang mendapatkan predikat WBK adalah BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Seni dan Budaya, BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, dan Politeknik Negeri Batam, sedangkan yang mendapatkan predikat WBBM adalah BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. Beberapa program yang mendukung dalam mencapai IKP 5.1 ini, yaitu : 1. Mendampingi BBPPMPV BMTI saat dikunjungi Kementerin PANRB dalam rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas untuk satker yang diajukan menjadi Zi WBBM. 2. Meverifikasi LKE satker di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi melalui aplikasi SIAZIK sebagai awal pengusulan satker yang akan diajukan mendapatkan Zi WBK/WBBM tahun 2023. 3. Melakukan koordinasi antar area perubahan dalam menyusun rencana kerja RBI pada 25 Oktober 2022. 4. Menyusun laporan pelaksanaan RBI Ditjen Pendidikan Vokasi. Kendala / Permasalahan : 1. Pada pertengahan tahun 2022 ditetapkan kebijakan bahwa kuota pengusulan calon unit kerja berpredikat Zi WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya 15 (lima belas) satuan kerja. Hal tersebut sesuai dengan Surat Nomor 34682/A.A4/OT.01.03/2022 Tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Berpredikat Zi WBK/WBBM Tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021, SE MenPANRB Nomor 15 Tahun 2022, serta Surat Deputi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/PW.00/2022, tanggal 24 Mei 2022. 2. Belum adanya aplikasi yang dapat mengisi LKE PMPRB dan mengumpulkan dokumen RBI secara realtime sehingga dibutuhkan koordinasi Tim RBI yang intensif. 3. Tugas RBI hanya sebagai tugas tambahan sehingga sulit untuk dimintai komitmen dalam pelaksanaan tugas RBI. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mengembangkan aplikasi untuk menilai PMPRB sehingga memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi nilai PMPRB dan database dokumen RBI Ditjen Pendidikan Vokasi. 2. Perlu adanya dorongan secara terus-menerus dalam membangun Tim Kerja RB Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai modal peningkatan kualitas hasil PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) ataupun PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. 3. Melakukan internalisasi dan mengembangkan pola kerja yang menjamin setiap pegawai dapat melaksanakan 8 area perubahan menjadi budaya kerja di lingkungannya.
---	---	---	--------	----	---	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

Jakarta,14 Januari 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Kiki Yulianti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan – Jakarta 10270
Telp. (021) 5737104
laman : www.itjen.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2023
Pengendali Mutu Inspektorat Jenderal,


P Salwin, M.D
NIP196005151987031002

